

**PEMBERANTASAN *WILDLIFE CRIME* DI INDONESIA
MELALUI KERJASAMA ASEAN *WILDLIFE ENFORCEMENT*
NETWORK (ASEAN-WEN)**



Tesis

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2
Pada Program Studi Ilmu Lingkungan**

**SIGIT HIMAWAN
21080111400025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

TESIS

**PEMBERANTASAN *WILDLIFE CRIME* DI INDONESIA MELALUI
KERJASAMA ASEAN *WILDLIFE ENFORCEMENT NETWORK*
(ASEAN-WEN)**

Disusun oleh

**Sigit Himawan
21080111400025**

**Mengetahui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. Boedi Hendrarto, M.Sc., PhD.

Dr. Tukiman Taruna

**Ketua Program Studi
Ilmu Lingkungan**

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBERANTASAN *WILDLIFE CRIME* DI INDONESIA MELALUI
KERJASAMA ASEAN *WILDLIFE ENFORCEMENT NETWORK*
(ASEAN-WEN)

Disusun oleh

SIGIT HIMAWAN

21080111400025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 25 Oktober 2012
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Ketua :

Tanda Tangan

Drs. Boedi Hendarto, M.Sc., PhD

Anggota:

1. Dr. Tukiman Taruna

2. Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP

3. Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2012

Penulis

Sigit Himawan

BIODATA PENULIS



SIGIT HIMAWAN lahir di Pemalang – Jawa Tengah pada tanggal 27 September 1979, sebagai putra kedua dari pasangan Bapak Kardjimin dan Ibu Maslini. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 02 Bantarbolang-Pemalang (1985 – 1991), kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Bantarbolang – Pemalang (1991 – 1994) dan pendidikan menengah di SMUN 1 Pemalang (1994 – 1997).

Gelar kesarjanaan Strata 1 Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada diraih pada tahun 2002. Tahun 2006 hingga sekarang, penulis bekerja di Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan. Penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dengan mendapat dukungan beasiswa dari Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren – Bappenas) tahun 2011 – 2012.

Penulis telah dikaruniai dua orang putra bernama Silvan Nando Himawan dan Raditya Arsa Himawan, buah pernikahan dengan Ulil Azmi yang turut memberikan dukungan dalam kehidupan penulis.

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayat, dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan lancar. Tesis dengan judul “Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia Melalui Kerjasama ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S2.Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Boedi Hendrarto, M.Sc. PhD. sebagai Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan dan masukannya selama proses penyusunan Tesis ini
2. Dr. Tukiman Taruna sebagai Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan masukannya selama proses penyusunan Tesis ini.
3. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro serta seluruh dosen pengajar dan staf administrasi.
4. Kepala Pusat Pembinaan dan Pelatihan Perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren – Bappenas) atas kesempatan belajar dan beasiswa yang diberikan.
5. Direkur Penyidikan dan Pengamanan Hutan – Ditjen PHKA, Direktur Penindakan dan Penyidikan – Ditjen Bea Cukai, Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, dan Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kejagung beserta seluruh jajarannya dalam dukungan dan bantuan sebagai obyek penelitian.

6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan angkatan 32 atas dukungan, kebersamaan, dan semangatnya.
7. Semua pihak yang telah turut serta membantu proses penelitian dan penyusunan Tesis ini.

Penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat dan bermanfaat dan memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

Semarang, Oktober 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
BIODATA PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Keanekaragaman Hayati	11
2.1.1 Definisi Keanekaragaman Hayati	11
2.1.2 Konservasi Keanekaragaman Hayati.....	12
2.2 Wildlife	13
2.2.1 Definisi	13
2.2.2 Ancaman Kepunahan Tumbuhan dan Satwa Liar	14
2.2.3 <i>Wildlife Crime</i>	15
2.2.4 Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia	17
2.3 ASEAN <i>Wildlife Enforcement Network</i>	19

2.4	Evaluasi	21
2.5	Analisis SWOT	23

III. METODE PENELITIAN

3.1	Tipe Penelitian	26
3.2	Ruang Lingkup Penelitian	26
3.3	Waktu Penelitian	27
3.4	Narasumber	27
3.5	Jenis dan Sumber Data	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data	28
3.7	Teknik Analisis Data	29
3.8	Kerangka Pemikiran	31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Kebijakan Pemberantasan <i>Wildlife Crime</i> di Indonesia	33
4.2	Kondisi <i>Wildlife Crime</i> di Indonesia	39
4.2.1	<i>Wildlife Crime</i> di Indonesia	39
4.2.2	Kewenangan Pemberantasan <i>Wildlife Crime</i>	47
4.3	ASEAN <i>Wildlife Enforcement Network</i>	48
4.3.1	Implementasi ASEAN WEN di Indonesia	49
4.3.2	Permasalahan	58
4.4	Analisis Dampak Kerjasama ASEAN WEN	63
4.4.1	Hasil Pemberantasan <i>Wildlife Crime</i> di Indonesia	63
4.4.2	Dampak Kerjasama ASEAN WEN	68

4.5	Analisis Strategi Pemberantasan <i>Wildlife Crime</i> Melalui Kerjasama ASEAN WEN	72
V. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN.....		91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penelitian Terkait	9
Tabel 3.1. Jenis data, metode yang digunakan serta sumber data	32
Tabel 4.1. Jenis Satwa Dilindungi di Indonesia yang Sering Diperdagangkan.....	43
Tabel 4.2. Harga Perdagangan Trenggiling	45
Tabel 4.3. Kasus Kejahatan terhadap TSL oleh Masyarakat Lokal Tahun 2008 – 2011	46
Tabel 4.4. Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Tugas <i>National Tasko</i> <i>Force ASEAN WEN</i>	51
Tabel 4.5. Jumlah Kasus Kejahatan Terhadap TSL dan Penyelesaiannya Tahun 2005 – 2011	63
Tabel 4.6. Kasus Besar Kejahatan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2007 – 2012	64
Tabel 4.7. Jumlah Kasus Illegal Logging dan Penyelesaiannya Tahun 2005 – 2011	67
Tabel 4.8. Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)	75
Tabel 4.9. Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS).....	76
Tabel 4.10. Matrik SWOT	78
Tabel 4.11. Urutan Prioritas Strategi.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data (Interactive Model)	30
Gambar 3.2. Diagram Alir Pemikiran	31
Gambar 4.1. Obat Tradisional China	41
Gambar 4.2. Pendidikan dan Pelatihan PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan	54
Gambar 4.3. Contoh Materi Sosialisasi dan Kampanye.....	55
Gambar 4.4. Perdagangan Satwa di Pasar Burung Jatinegara	59
Gambar 4.5. Barang Bukti Kasus Penyelundupan Penyu di Kalimantan Timur dan Penyelundupan Trenggiling di Pelabuhan Merak.....	65
Gambar 4.6. Pemusnahan Barang Bukti Trenggiling.....	65
Gambar 4.7. Grafik Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (P 21) Tahun 2005 – 2011	66
Gambar 4.8. Grafik Persentase Penyelesaian Kasus Illegal Logging (P 21) Tahun 2005 – 2011	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran.1. Panduan Wawancara.....	91
Lampiran 2. Pemberian Bobot dan Peringkat Pada Faktor Internal dan Eksternal.....	93

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam memberantas *wildlife crime* di Indonesia antara lain penerbitan kebijakan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan menjalin kerjasama dalam ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN). ASEAN WEN mulai dibentuk pada tahun 2005 dan bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap *wildlife crime* di regional ASEAN melalui peningkatan penyidikan kasus *wildlife crime* dan peningkatan kapasitas negara anggota dalam penegakan hukum. Di Indonesia yang menjadi *National Focal Point* dalam kerjasama ini adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia, mengetahui kondisi *wildlife crime* di Indonesia, mengkaji dampak kerjasama ASEAN WEN tersebut terhadap upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia dan merumuskan usulan strategi pemberantasan *wildlife crime* melalui implementasi kerjasama ASEAN-WEN.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal PHKA, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan. Data dan informasi dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi, hasil yang telah dicapai, dan dampak kerjasama ASEAN WEN. Selanjutnya untuk rumusan strategi digunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberantasan *wildlife crime* yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 beserta aturan dibawahnya belum terimplementasi dengan baik, *wildlife crime* di Indonesia dilatarbelakangi oleh tingginya nilai ekonomi dari perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, kerjasama ASEAN WEN telah memberikan dampak terhadap peningkatan upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia. Kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendorong dan pendukung kebijakan Indonesia dalam memerangi *wildlife crime*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah kasus *wildlife crime*, peningkatan persentase penyelesaian secara hukum kasus *wildlife crime*, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Strategi pemberantasan *wildlife crime* melalui kerjasama ASEAN WEN yang diprioritaskan untuk dilakukan yaitu peningkatan operasi penegakan hukum, optimalisasi peran *National Task Force* ASEAN WEN, peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait, peningkatan kepedulian masyarakat, pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan.

Kata Kunci : *Wildlife Crime*, ASEAN WEN, dampak, strategi

ABSTRACT

Efforts done by Indonesian government to extinguish the wildlife crime is issued policies on biodiversity conservation and co-operation in the Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). The ASEAN-WEN was established in 2005 and aims to improve law enforcement towards wildlife crime in the ASEAN regional territory by enforcing investigation of the wildlife crime cases and improving capacity of the member countries in the law enforcement. The National Focal Point for this co-operation in Indonesia is the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (PHKA). This study aimed to know policies on combatting wildlife crime, to know existing condition of wildlife crime in Indonesia, analyze the impacts of the ASEAN-WEN co-operation on the efforts of wildlife crime extinguishment in Indonesia and to formulate strategies to extinguish the wildlife crime by implementing the ASEAN-WEN co-operation.

Methods used for the study were interview, observation, and documentation to concerned parties: Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, Directorate General of Customs, Police, and Attorney Boards. Data and information were collected and then analyzed in a qualitative-descriptive manner to illustrate the implementation, ongoing results, and effects of the ASEAN-WEN co-operation. The study also used a SWOT analysis for strategy formulation.

Results of the study showed that combating wildlife crime policy in Law No. 5 of 1990 and its underlying rules have not been implemented properly, wildlife crime in Indonesia due to the high economic value of the illegal trade in wild plants and animals, the ASEAN-WEN co-operation had given impacts on the improving efforts of extinguishing wildlife crime in Indonesia. The ASEAN-WEN co-operation might enforce and support the Indonesian policies on wildlife crime. This had been evidenced by decreasing numbers of wildlife crime and improving capacities of law enforcing apparatus. The strategies for extinguishing the wildlife crime through the ASEAN-WEN co-operation focused on improving law enforcement operation, optimizing roles of the ASEAN-WEN National Task Force, improving coordination and co-operation between concerned institutions, community care, education, and training for field supervisory and security staff.

Keywords: Wildlife Crime, ASEAN-WEN, impacts, strategy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas kawasan hutan di Indonesia mencakup sekitar 64% luas daratan yaitu seluas 130,609 juta hektar (Statistik Kehutanan, 2010). Kehutanan Indonesia menduduki peringkat ke tiga terbesar dunia baik dari segi luas hutan tropisnya maupun dari sisi kekayaan keanekaragaman hayatinya. Oleh karena itu, Indonesia termasuk sedikit negara di dunia yang mendapat julukan “*mega biodiversity country*”. Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sangat tinggi, yaitu sekitar 515 species mamalia dengan 39% endemik (urutan kedua di dunia); 511 species reptil dengan 150 endemik (urutan keempat di dunia); 1539 species dengan 397 species endemik (urutan kelima); 270 species amfibi dengan 100 species endemik (urutan keenam); dan 2827 species binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. Selanjutnya, Indonesia memiliki 35 species primata (urutan keempat, 18% endemik) dan 121 species kupu-kupu (44% endemik). Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah Brazil, dan mungkin Columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar 1400 species. Dalam hal keanekaragaman tumbuhan, Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia; yaitu memiliki lebih dari 38.000 species, 55% diantaranya endemik. Keanekaragaman palem di Indonesia menempati urutan pertama, mencapai 477 jenis dan 225 jenis diantaranya endemik. Lebih dari setengah dari seluruh species (350) pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting (dari famili *Dipterocarpaceae*) terdapat di negara ini, 155 di antaranya endemik di Kalimantan (Kementerian Kehutanan, 2010).

Kekayaan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia tersebut, juga diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati itu sendiri. Kepunahan spesies dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi umat manusia, selain permasalahan pencemaran dan bencana lingkungan. Menurut Soemarwoto (2004) inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya. Lebih lanjut Soemarwoto mengatakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungan hidupnya disebut ekologi. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah permasalahan ekologi. Hubungan timbal balik dan interaksi yang terjadi tersebut akan membentuk suatu kesatuan sistem ekologi yang teratur yaitu ekosistem. Keteraturan itu terjadi oleh adanya transfer energi dan materi antar komponen dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kehilangan atau berkurangnya salah satu komponen akan menyebabkan sistem tersebut terganggu atau mengalami ketidakseimbangan. Perlindungan atau konservasi terhadap jenis satwa maupun tumbuhan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tumbuhan dan satwa juga bermanfaat sebagai sumber genetik. Setiap makhluk hidup memiliki keanekaragaman genetik, sehingga setiap jenis memiliki sifat keturunan yang tertentu. Selain sebagai sumber pangan, tumbuhan dan satwa juga sangat berguna bagi perkembangan teknologi dalam mendukung kehidupan manusia. Misalnya penemuan penisilin yang diproduksi oleh jamur, tanaman Kina untuk obat Malaria, penemuan Stevisoid (zat pemanis) dari tumbuhan *Stevia rebaudiana* di Amerika Latin, dan sebagainya. Suatu penelitian di Amerika Serikat menunjukkan, dalam tahun 1967 25% obat yang harus dijual dengan resep berasal dari tumbuhan. Dalam tahun 1978 40% obat yang harus dijual dengan resep berasal dari tumbuhan, hewan dan jasad renik (Soemarwoto, 2004).

Dengan keanekaragaman yang tinggi maka semakin beranekaragam pula pilihan sumber daya yang dapat mendukung kehidupan manusia di masa depan.

Namun demikian, ancaman penurunan populasi dan kepunahan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia terus berlangsung. Penyebab utama kepunahan tumbuhan dan satwa di antaranya adalah kehilangan, kerusakan, serta terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan serta perdagangan ilegal (Pokja Kebijakan Konservasi, 2008). Data statistik kehutanan menunjukkan angka deforestasi hutan di Indonesia pada periode 2003 – 2006 sebesar 1.174.068 Ha/tahun dan pada periode 2006 – 2009 sebesar 832,126,9 Ha/tahun (Statistik Kehutanan, 2009 & 2010). Deforestasi tersebut merupakan perubahan kondisi lahan dari hutan menjadi bukan hutan termasuk perubahan untuk perkebunan, pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain (Statistik Kehutanan, 2010). Perubahan kawasan hutan menjadi peruntukan lain mengakibatkan habitat satwa semakin menyempit dan terfragmentasi sehingga terbentuk bagian-bagian habitat yang terisolasi satu sama lain seperti model biogeografi pulau. Secara teori, dampak dari isolasi terhadap satwa dapat diprediksi yaitu kawasan-kawasan yang potensial untuk berpindah satwa akan berkurang, perpindahan satwa akan berkurang dengan konversi lanskap alam, sementara sumber daya alam yang penting yang berada diluar batas-batas kawasan akan hilang atau punah (Shafer, 1990 dalam Wiratno, dkk. 2004). Penelitian Lengkong (2011) menunjukkan bahwa degradasi habitat Monyet Hitam Sulawesi di CA Gunung Dudasudara mengakibatkan Monyet Hitam Sulawesi cenderung membentuk kelompok-kelompok dengan jumlah anggota yang kecil dan tingkah laku yang semakin liar, selain itu penyebarannya semakin jauh masuk ke dalam hutan.

Perburuan dan perdagangan ilegal satwa terus berlangsung untuk memenuhi permintaan pasar yang antara lain digunakan sebagai

peliharaan, dikonsumsi, dan untuk tujuan pengobatan tradisional. Penelitian yang dilakukan oleh Lee, dkk. (2005) di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa selama 2 tahun pengamatan ditemukan 6.963 individu mamalia liar yang diangkut untuk diperdagangkan dan 96.586 individu mamalia liar ditemukan diperdagangkan di 6 Pasar. Kasus peredaran dan perdagangan ilegal satwa liar di Propinsi Lampung pada kurun waktu 5 tahun terakhir terungkap 243 kasus. (Antoni, 2005). Perdagangan Satwa di Pasar-Pasar Burung Jakarta juga memperdagangkan jenis kura-kura darat dan air tawar sebanyak 48 jenis, dimana 33,33% merupakan jenis asli dan 66,67 % merupakan jenis asing dan diantaranya ada 3 jenis asli Indonesia yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (Sinaga, 2008). Penelitian Sepherd (2010) juga menunjukkan hasil survey selama satu dekade (1997 – 2008) di pasar-pasar hewan di Sumatera Utara terdapat 1.953 primata dari 10 spesies yang sering diperdagangkan, jumlah terbanyak adalah Kera Ekor Panjang (774 individu), Kukang (714 individu), dan Kera Ekor Babi (380 individu). Selain itu, 6 (enam) dari jenis yang diamati merupakan jenis dilindungi di Indonesia. Saat ini juga sedang marak perdagangan dan penyelundupan salah satu jenis satwa dilindungi yaitu Trenggiling, pada bulan Mei 2011 petugas Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Trenggiling tujuan Vietnam dengan barang bukti 7453,08 kg Trenggiling beku dan 64,6 kg (KOMPAS, 2011). Selanjutnya pada bulan Juli 2011 petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan Trenggiling tujuan Singapura senilai Rp 23 Milyar dengan barang bukti 1.732 kg Trenggiling beku dan 380 kg sisik (okezone, 2011).

Perdagangan spesies dilindungi, termasuk bagian tubuhnya merupakan bisnis yang menguntungkan yang melibatkan banyak pelaku, mulai dari pemburu, penampung, tukang offset (*taxidermist*) hingga eksportir, yang membentuk suatu mata rantai perdagangan tersendiri. Menurut analisis WWF dan TRAFFIC (2003) nilai perdagangan tumbuhan

dan satwa secara internasional (termasuk perdagangan ilegalnya) mencapai USD 159 miliar per tahun. Khusus untuk satwa yang dilindungi, nilai perdagangannya di tingkat internasional mencapai US\$20 miliar per tahun (Pokja Kebijakan Konservasi, 2008).

Upaya untuk mencegah penurunan populasi dan kepunahan tumbuhan dan satwa liar perlu terus dilakukan. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia antara lain meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES), penerbitan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, penegakan hukum perburuan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta melakukan kerjasama baik bilateral, regional, maupun multilateral untuk memerangi peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar.

Salah satu kerjasama yang dilakukan Pemerintah adalah kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN). ASEAN-WEN dibentuk pada pertemuan Menteri-Menteri Negara ASEAN yang bertanggungjawab dalam implementasi CITES di Bangkok tanggal 1 Desember 2005. Tujuan pembentukan ASEAN-WEN adalah untuk meningkatkan hubungan aparat penegak hukum antar negara ASEAN dalam memberantas peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Jaringan ini beranggotakan lembaga-lembaga di negara ASEAN yang menangani penegakan hukum terhadap *wildlife crime*, yaitu Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan CITES *Management Authority*. Di Indonesia yang menjadi CITES *Management Authority* adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan. Pada pertemuan pertama ASEAN

WEN disepakati bahwa CITES *Management Authority* sebagai *National Focal Point* ASEAN WEN.

Indonesia, dalam hal ini dipimpin oleh Direktorat Jenderal PHKA selaku *National Focal Point*, telah mengimplementasikan mandat dari ASEAN-WEN yaitu dengan :

1. Membentuk National Task Force yang beranggotakan instansi-instansi yang terkait bidang peredaran tumbuhan dan satwa liar yang diketuai oleh Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar,
3. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan
4. Melakukan upaya penegakan hukum kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar.

Namun demikian, perlu dikaji bagaimana kebijakan dan kondisi *wildlife crime* di Indonesia, serta apakah kerjasama ASEAN-WEN dapat berjalan efektif dan memberikan dampak bagi upaya pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dan pelestariannya di Indonesia. Selain itu, juga perlu dikaji strategi yang paling tepat dalam pemberantasan *wildlife crime* yang dilakukan Direktorat Jenderal PHKA selaku *National Focal Point* ASEAN WEN.

1.2. Perumusan Masalah

Ancaman kepunahan dan penurunan populasi tumbuhan dan satwa liar di Indonesia terus berlangsung. Penyebab utama terus terjadinya ancaman kepunahan tumbuhan dan satwa liar adalah kehilangan, kerusakan, serta terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan serta perdagangan ilegal. Perburuan

dan perdagangan ilegal merupakan bentuk *wildlife crime* yang paling mengancam upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan penyebab tersebut, upaya yang seharusnya dilakukan untuk melindungi dan melestarikan tumbuhan dan satwa liar adalah dengan mencegah kerusakan habitat dan memberantas *wildlife crime*.

Pencegahan kerusakan habitat dilakukan melalui pengendalian alih fungsi hutan, pemberantasan ilegal logging dan perambahan kawasan hutan. Sedangkan untuk memberantas *wildlife crime* antara lain dengan operasi penegakan hukum dan memutuskan mata rantai perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar terutama yang dilindungi dipicu karena adanya permintaan akan tumbuhan dan satwa liar untuk dikonsumsi, obat-obatan, maupun peliharaan. Salah satu permintaan yang menjanjikan keuntungan ekonomis tinggi adalah dari luar negeri, misalnya untuk bahan obat-obat tradisional di China. Negara-Negara ASEAN merupakan sumber sekaligus jalur bagi perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal ke negara-negara luar ASEAN, seperti China. Untuk itu, negara-negara ASEAN telah membentuk ASEAN-WEN dengan tujuan memberantas perdagangan ilegal di regional ASEAN.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya baik melalui penerbitan kebijakan dan penegakan hukum peraturan perundangan dalam hal ini UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya maupun berkomitmen dalam kerjasama internasional seperti kerjasama ASEAN-WEN. Namun demikian, di Indonesia masih ditemui kasus-kasus perburuan, perdagangan dan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar, seperti penyelundupan Trenggiling sebanyak 7453,08 kg Trenggiling beku dan 64,6 kg sisik di Pelabuhan Tanjung Priok (KOMPAS, 2011), pembantaian Orangutan oleh Perusahaan Perkebunan Sawit di Kab. Kutai Kartanegara (detiknews, 2011), perburuan dan perdagangan kulit Harimau Sumatera di Jambi (Tribun Jambi, 2012), dan

sebagainya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi *wildlife crime* di Indonesia?
3. Bagaimana dampak kerjasama ASEAN-WEN terhadap upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia?
4. Apa dan bagaimana strategi pemberantasan *wildlife crime* melalui implementasi kerjasama ASEAN-WEN?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kebijakan pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia.
2. Mengetahui kondisi *wildlife crime* di Indonesia.
3. Mengkaji dampak kerjasama ASEAN-WEN terhadap upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia.
4. Merumuskan usulan strategi pemberantasan *wildlife crime* melalui implementasi kerjasama ASEAN-WEN.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi unit manajemen dalam penyempurnaan implementasi kerjasama ASEAN-WEN untuk mendukung pelestarian tumbuhan dan satwa liar di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian data, penelitian tentang evaluasi dampak kerjasama Indonesia dalam ASEAN WEN terhadap upaya pemberantasan *Wildlife Crime* di Indonesia, belum pernah dilakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan perdagangan tumbuhan dan

satwa liar maupun yang berhubungan dengan *wildlife crime* diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel. 1.1. Penelitian Terkait

No.	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Hasil penelitian
1.	Rudi Antoni (2005)	Efektivitas Penerapan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di Propinsi Lampung)	Mengetahui implementasi UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk menanggulangi tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penyelesaian tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi apabila dibandingkan dengan peredaran dan perdagangan satwa liar yang terjadi di Provinsi Lampung masih jauh dari yang diharapkan yaitu dalam 5 tahun terakhir hanya 243 kasus yang terungkap
2.	Robert J. Lee, Antonia J. Gorog, Asri Dwiyahreni, Stephan Siwu, Jon Riley, Harry Alexander, Gary D. Paoli, Widodo Ramono (2005)	Wildlife Trade and Implications for Law Enforcement in Indonesia : a Case Study From North Sulawesi	Mengetahui perdagangan satwa liar di Propinsi Sulawesi Utara	Selama 2 tahun pengamatan ditemukan 6.963 individu mamalia liar yang diangkut untuk diperdagangkan dan 96.586 individu mamalia liar ditemukan diperdagangkan di 6 Pasar
3.	Hans Nico A. Sinaga (2008)	Perdagangan Jenis Kura-Kura Darat dan Kura-Kura Air Tawar di Jakarta	Menganalisis perdagangan kura-kura darat dan air tawar di Jakarta dan menganalisis persepsi para pihak tentang konservasi jenis hayati Indonesia	Jenis kura-kura darat dan air tawar yang diperdagangkan sebanyak 48 jenis, dimana 33,33% merupakan jenis asli dan 66,67 % merupakan jenis asing. Diantaranya ada 3 jenis asli Indonesia yang telah dilindungi. Penguatan pengendalian peredaran satwa liar dapat dilakukan melalui penerbitan aturan khusus perdagangan satwa liar, revisi PP No. 7 Tahun 1999, dan pengalihan sebagian kewenangan pemanfaatan jenis ke daerah.
4.	Chris R. Shepherd (2010)	Illegal primate trade in Indonesia exemplified by surveys carried out over a decade in North Sumatra	Mengkaji perdagangan primata di Propinsi Sumatera Utara serta mengusulkan rekomendasi untuk penguatan penegakan hukum terkait upaya konservasi	Hasil survey selama satu dekade (1997 – 2008) di pasar-pasar hewan di Sumatera Utara terdapat 1.953 primata dari 10 spesies yang sering diperdagangkan, jumlah terbanyak adalah Kera Ekor Panjang (774 individu), Kukang (714 individu), dan Kera Ekor Babi (380 individu). Selain itu,

No.	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Hasil penelitian
				6 (enam) dari jenis yang diamati merupakan jenis dilindungi di Indonesia
5.	Henry J. Lengkong (2011)	Laju Degradasi Habitat Monyet Hitam Sulawesi (<i>Macaca nigra</i>) di Cagar Alam Gunung Dudasudara Sulawesi Utara	Mengamati keadaan habitat dan penyebaran monyet hitam sulawesi di Cagar Alam Gunung Dudasudara dan aktifitas masyarakat yang terkait dengan keberadaan monyet hitam sulawesi di sekitar kawasan.	Penyebaran populasi monyet hitam sulawesi tergantung pada ketersediaan sumber pakan dan perlindungan di dalam hutan. Tanpa usaha mengurangi perburuan dan perambahan hutan, populasi ini akan mengalami kepunahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keanekaragaman Hayati

2.1.1. Definisi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati (*biological diversity* atau *biodiversity*) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasad renik di alam (Dahuri, 2003). Pengertian keanekaragaman hayati juga terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati, dimana didefinisikan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies, dan ekosistem.

Berdasarkan definisi di atas, keanekaragaman hayati dapat dipergunakan untuk tiga tingkatan organisasi biologi, yaitu :

1. Keanekaragaman genetik

Keanekaragaman genetik menjelaskan adanya variasi faktor-faktor keturunan di dalam dan diantara individu dalam suatu populasi (Dahuri, 2003). Individu-individu dalam populasi pebedaan genetika antara satu dengan lainnya karena tiap individu memiliki bentuk-bentuk gen yang khas. Selain keanekaragaman gen antar jenis, terdapat pula keanekaragaman gen di dalam jenis (Soemarwoto, 2004).

2. Keanekaragaman spesies

Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman dan frekuensi terdapatnya spesies yang berbeda (Suryati, dkk. 2007). Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan

di bumi. Masing – masing ekosistem memiliki keanekaragaman spesies yang berbeda-beda.

3. Keanekaragaman ekosistem.

Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman dan frekuensi terdapatnya ekosistem yang berbeda (Suryati, dkk. 2007). Keanekaragaman ekosistem dapat dikenali melalui pengamatan terhadap lingkungan fisik, dimana lingkungan fisik yang berbeda melahirkan komunitas kehidupan yang berbeda.

2.1.2. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan sumber kekayaan genetik yang dapat membantu kesejahteraan manusia. Menurut Mangunjaya (2006) ada empat hal menonjol arti penting keanekaragaman hayati, yaitu :

1. Keanekaragaman hayati adalah sumber potensial kekayaan genetik (dengan variasinya) yang sangat besar nilainya bagi cadangan genetika pangan.
2. Keanekaragaman hayati di hutan merupakan satu-satunya harapan hidup manusia karena di sana terdapat obat-obatan alamiah.
3. Memiliki keanekaragaman hayati berarti memiliki pilihan (option) yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memiliki keanekaragaman hayati berarti mempunyai kekayaan jenis yang bervariasi.

Oleh karena keanekaragaman hayati memiliki arti yang sangat penting, maka konservasi keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk menjaga aset tersebut. Melestarikan keanekaragaman hayati dapat berarti mendukung kelangsungan pembangunan berkelanjutan dan dengan konservasi keanekaragaman hayati, berarti telah mempersiapkan untuk menghadapi perubahan di masa depan.

Menurut Suryati, dkk. (2007) keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya hayati yang dapat dikomersialisasikan oleh negara pemiliknya. Keberadaan keanekaragaman hayati dapat terancam apabila pemanfaatannya tidak memperhatikan lagi kondisi lingkungan hidup dengan hanya memperhatikan segi komersialisasinya saja. Ada 6 (enam) penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu :

1. Populasi penduduk yang meningkat yang berakibat langsung pada konsumsi sumberdaya alam;
2. Penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan;
3. Sistem dan kebijakan ekonomi yang tidak member penghargaan kepada lingkungan dan sumberdayanya, seperti perubahan fungsi lahan pertanian menjadi wilayah pemukiman;
4. Ketidakadilan dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penyaluran keuntungan dari penggunaan dan pelestarian sumberdaya hayati;
5. Kurangnya pengetahuan dan penerapan tentang keanekaragaman hayati; dan
6. Sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong eksploitasi.

2.2. *Wildlife*

2.2.1. Definisi

Wildlife sering diterjemahkan menjadi tumbuhan dan satwa liar. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati baik yang hidup di darat maupun di air. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. Sedangkan definisi satwa adalah sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat

liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis dilindungi dan tidak dilindungi. Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria : mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

2.2.2. Ancaman Kepunahan Tumbuhan dan Satwa Liar

Kepunahan telah menjadi kenyataan hidup sejak makhluk hidup itu ada. Beberapa juta spesies yang ada sekarang merupakan spesies yang berhasil bertahan dari kurang lebih setengah milyar spesies yang diduga pernah ada (WCED, 1988). Hampir semua kepunahan masa lalu terjadi melalui proses-proses alam, namun sekarang penyebab utama kepunahan adalah kegiatan manusia. Penyebab utama kepunahan tumbuhan dan satwa liar, terutama di Indonesia, yaitu :

1. Kerusakan Habitat

Laju deforestasi di Indonesia dalam kurun waktu 2009 – 2010 adalah sebesar 1,125 juta Ha/tahun, bahkan dalam periode 1997 – 2000 laju deforestasi mencapai 2,83 juta Ha/tahun. Besarnya laju deforestasi tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain konversi hutan untuk pembangunan sektor lain, kebakaran hutan, pencurian dan perdagangan ilegal kayu, perambahan kawasan hutan, dan penambangan liar. Kerusakan dan konversi hutan untuk penggunaan lain akan menyebabkan hutan terfragmentasi menjadi bagian-bagian yang kecil dan terisolasi satu dengan lainnya, sehingga akan tercipta keadaan yang mirip dengan model biogeografi pulau. Secara teori, dampak dari isolasi terhadap satwa dapat diprediksi yaitu kawasan-kawasan yang potensial untuk berpindah satwa akan berkurang, perpindahan satwa akan berkurang dengan konversi lanskap alam, sumber daya alam yang penting yang berada diluar batas-batas kawasan akan hilang atau punah (Shafer, 1990 dalam Wiratno, dkk.

2004). Kerusakan hutan berarti juga kerusakan habitat bagi satwa liar, hutan tidak lagi mampu mendukung kehidupannya. Ketika terjadi perubahan pada habitatnya, kemungkinan yang ada adalah migrasi dan beradaptasi dengan habitat baru atau mengalami kematian dan selanjutnya kepunahan. Penelitian yang dilakukan Lengkong (2011) menunjukkan bahwa degradasi habitat Monyet Hitam Sulawesi di CA Gunung Dudasudara mengakibatkan Monyet Hitam Sulawesi cenderung membentuk kelompok-kelompok dengan jumlah anggota yang kecil dan tingkah laku yang semakin liar. Selain itu penyebarannya semakin jauh masuk ke dalam hutan.

2. Eksploitasi yang berlebihan

Eksploitasi terhadap tumbuhan dan satwa liar terjadi karena alasan untuk dikonsumsi, pembuatan obat-obat tradisional, dijadikan satwa peliharaan, dijadikan hiasan, dan untuk dikoleksi. Alasan tersebut kemudian menjadikan tumbuhan dan satwa liar sebagai komoditas perdagangan. Primata yang diperdagangkan baik dalam negeri maupun internasional, adalah untuk memenuhi kebutuhan industri bio medis, pasar farmasi, bahan obat tradisional, bisnis hiburan, atau hewan peliharaan (Nijman dkk, 2011). Lebih lanjut Nijman dkk, menyatakan bahwa dalam 15 tahun terakhir telah terjadi peningkatan secara linear dalam ekspor Primata hidup (lebih dari 3500 individu tiap tahunnya) dengan China sebagai tujuan ekspor terbesar. Dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sering ditemui bahwa eksploitasi yang berlebihan terhadap suatu jenis untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek saja, sementara hal tersebut membahayakan dan mengancam ketersediaan sumber daya untuk penggunaan masa depan (Pires, dkk. 2011)

Perusakan habitat dan eksploitasi spesies secara berlebihan menyebabkan Indonesia memiliki daftar spesies fauna terancam punah

terpanjang di dunia, yang mencakup 126 spesies burung, 63 spesies mamalia dan 21 spesies reptile (Sumardja, 1998 dalam Widodo, 2007)

2.2.3. Wildlife Crime

Wildlife crime atau kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap lingkungan (*environmental crime*). Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikembangkan oleh United Nation Interregional Crime and Justice Research Institute, bahwa kejahatan terhadap lingkungan terdiri dari 5 (lima) bentuk kejahatan (Banks dkk., 2008), yaitu :

1. Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang melanggar konvensi internasional tentang perdagangan spesies flora dan fauna yang terancam punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).
2. Perdagangan ilegal *Ozones-Depleting Substances* (ODS) yang melanggar Protokol Montreal 1987.
3. Pembuangan dan pengangkutan ilegal limbah berbahaya
4. Illegal fishing
5. Illegal logging dan perdagangan ilegal kayu

Menurut Interpol *wildlife crime* adalah membawa, memperdagangkan, memanfaatkan dan memiliki tumbuhan dan satwa liar yang melanggar hukum nasional dan internasional (Pires, dkk., 2011). Hukum internasional yang mengatur pemanfaatan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar adalah CITES. Sedangkan hukum di Indonesia yang terkait dengan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, jenis kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan tumbuhan adalah :

1. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
2. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Sedangkan dalam pemanfaatan satwa, kegiatan yang dilarang adalah :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

2.2.4. Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia

Pemanfaatan jenis satwa liar secara langsung maupun tidak langsung telah membentuk keseharian setiap komunitas manusia di muka bumi (Freese 1998 dalam Sinaga 2008). Bentuk pemanfaatan tersebut telah berkembang dari pemanfaatan tradisional non komersial melalui perburuan dan pengumpulan (hunting and gathering) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Bolton 1997 dalam Sinaga 2008) menjadi pemanfaatan komersial untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas baik dalam bentuk bagian tubuh satwa maupun bentuk hidup (satwa peliharaan).

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia sebagai bentuk pemanfaatan telah diatur dalam PP No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Ketentuan dalam CITES. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi yang diperoleh dari hasil penangkaran maupun pengambilan atau penangkapan dari alam. Untuk pemanfaatan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Apendiks I CITES dapat dilakukan melalui upaya penangkaran. Satwa liar dilindungi hasil penangkaran yang telah mencapai generasi kedua (F2), dan unit usaha penangkarannya telah terdaftar di Sekretariat CITES dapat dimanfaatkan.

Semakin langka tumbuhan dan satwa tersebut maka nilainya dalam perdagangan akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan Nijman, dkk (2009) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan perdagangan Elang Jawa setelah dinyatakan sebagai Satwa Langka Nasional. Penelitian yang dilakukan Shepherd (2010) disebutkan bahwa di pasar-pasar burung Medan ditemukan 10 jenis primata yang sering diperdagangkan, dari 10 jenis tersebut, menurut IUCN Red List, 4 spesies termasuk *Endangered*, 4 termasuk *Vulnerable*, 1 termasuk *Threatened* dan 1 termasuk dalam *Least Concern*, sedangkan menurut hukum di Indonesia 6 spesies merupakan

jenis dilindungi. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi maraknya perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia, yaitu :

1. Adanya permintaan pasar
2. Nilai ekonomi yang tinggi
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
4. Penegakan hukum lemah
5. Issu belum menjadi permasalahan nasional.

Menurut Rosen dan Smith (2010) kondisi saat ini perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar sangat membahayakan, perlu lebih banyak sumber daya yang harus ditujukan untuk menyelidiki dan mengatur perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar pada level lokal, regional, dan internasional. Pada tingkat lokal, kampanye dan edukasi untuk masyarakat tentang perdagangan ilegal dan dampaknya dapat membantu untuk mengurangi permintaan. Pada skala regional, perlu adanya kemitraan dalam penegakan hukum, seperti ASEAN WEN.

2.3. ASEAN Wildlife Enforcement Network

ASEAN Wildlife Enforcement Network merupakan jaringan yang beranggotakan lembaga-lembaga di negara ASEAN yang menangani penegakan hukum *wildlife crime*, yaitu Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan CITES Management Authority. ASEAN WEN adalah :

- a. Sebuah jaringan penegakan hukum antar pemerintah di regional ASEAN yang dibentuk untuk memerangi perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.
- b. Respon proaktif untuk perdagangan ilegal dan kepunahan satwa di Asia Tenggara yang berada pada level mengkhawatirkan.

- c. Mekanisme pertukaran informasi dan media belajar antar negara anggota tentang praktek-praktek terbaik dalam penegakan hukum *wildlife crime*. (ASEAN WEN, 2009)

Jaringan ini dibentuk pada pertemuan Menteri – Menteri Negara ASEAN yang bertanggungjawab dalam implementasi CITES di Bangkok tanggal 1 Desember 2005.

Negara-Negara ASEAN telah lama ditargetkan oleh para pedagang tumbuhan dan satwa liar sebagai “Hotspot” proyek global bernilai multi miliar dalam perdagangan tumbuhan dan satwa liar legal maupun ilegal, baik dalam kondisi hidup ataupun olahan. Untuk perdagangan satwa yang dilakukan secara legal, menurut Nijman (2009) berdasarkan data tentang perdagangan internasional yang terdaftar dalam CITES pada periode 1998-2007 terdapat 35 juta hewan yang diekspor, meliputi 0,3 juta kupu-kupu; 16,0 juta kuda laut; 0,1 juta ikan lainnya; 17,4 juta reptil; 0,4 juta mamalia; dan 1,0 juta burung. Tiga puluh juta atau sekitar 300 jenis diantara jumlah jenis tersebut ditangkap secara liar dari alam. Selain hewan-hewan tersebut, juga terdapat 18 juta potong dan 2 juta kg karang hidup diekspor pada periode 1998 - 2007.

Sebagian besar dari jenis yang diperdagangkan merupakan jenis-jenis yang dilindungi di bawah aturan CITES. Sehingga tujuan dari pembentukan ASEAN-WEN adalah untuk meningkatkan hubungan aparat penegak hukum antar negara ASEAN dalam memberantas perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal yang akan dicapai melalui :

1. Pembentukan 3 kelompok kerja :
 - a. Kelompok kerja yang menangani penyidikan pelanggaran terhadap tumbuhan dan satwa liar (*Wildlife Crime Investigation*)
 - b. Kelompok kerja yang menangani peningkatan kapasitas anggota ASEAN-WEN (*Capacity Building*)

- c. Kelompok kerja yang menangani komunikasi publik dan pengumpulan dana bagi ASEAN-WEN (*Public Communications and Fund Raising*)
- 2. Pembentukan satuan tugas antar instansi penegakan hukum di tingkat nasional untuk meningkatkan kerjasama pemberantasan kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar
- 3. Menjadikan ASEAN-WEN sebagai wadah pertukaran informasi dalam proses penegakan hukum dan mengkoordinasikan partisipasi anggota dalam kelompok kerja Interpol dalam bidang kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar.
- 4. Peningkatan kerjasama bidang *capacity building* dalam penegakan hukum.

Salah satu mandat ASEAN WEN yang telah diimplementasikan di Indonesia adalah pembentukan ASEAN WEN *National Task Force* melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.128/IV-PPH/2008 tanggal 5 November 2008. ASEAN *National Task Force* beranggotakan dari instansi-instansi sebagai berikut :

- 1. Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Kementerian Kehutanan
- 2. Deputi 3/III Urusan Penegakan Hukum, Kementerian Polhukam
- 3. Badan Reskrim Mabes POLRI
- 4. *National Central Bureau* INTERPOL
- 5. Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan
- 6. Direktorat Penuntutan Jampidum, Kejaksaan Agung
- 7. Pusat Karantina Hewan, Kementerian Pertanian
- 8. Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

9. Program Kelautan Dinas Potensi Maritim – TNI AL

Sebagai ketua dari ASEAN WEN *National Task Force* ini adalah Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan. Tugas dari ASEAN WEN *National Task Force* ini adalah :

1. Identifikasi kasus-kasus pelanggaran peredaran tumbuhan dan satwa liar
2. Pemantauan perkembangan penanganan kasus bidang kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar
3. Percepatan penanganan dan penyelesaian kasus perkara peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar
4. Menyusun rencana tahunan dan contry report
5. Publikasi dan sosialisasi hasil penanganan kasus dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar
6. Berbagi informasi terkait peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar
7. Melaksanakan kerjasama antar *Task Force* ASEAN WEN dan pihak terkait dalam investigasi peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar
8. Menyelenggarakan pertemuan berkala

2.4. Evaluasi

Menurut Suharto (2006) dalam Djadmiko (2007) evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Evaluasi program merupakan kajian terhadap program dengan fokus perhatian pada hasil dan dampak yang ditimbulkan (Djadmiko, 2007). Menurut Subarsono (2006), evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat

kinerja suatu kebijakan. Selanjutnya Subarsono mengatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
- c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
- f. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (1994) dalam Subarsono (2006) mencakup lima indikator yaitu :

- a. Efektivitas → apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
- b. Kecukupan → seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
- c. Pemerataan → Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
- d. Responsivitas → Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
- e. Ketepatan → Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Menurut Dunn (1994) dalam Subarsono (2006), evaluasi terhadap suatu kebijakan dapat dilakukan dengan melalui berbagai pendekatan, yaitu :

- a. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari

hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

- b. Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
- c. Evaluasi keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam perilaku kebijakan. Evaluasi ini berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Asumsi utama dari evaluasi ini adalah bahwa tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program.

2.5. Analisis SWOT

Perencanaan strategis suatu lembaga merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang yang bertujuan untuk menyusun strategi sehingga sesuai dengan misi, sasaran serta kebijakan lembaga tersebut. Untuk itu, perencana strategis harus menganalisis

faktor-faktor strategis dari suatu lembaga yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini atau disebut juga analisis situasi (Rangkuti, 2006). Salah satu model untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2006). Selanjutnya Rangkuti mengatakan bahwa analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*). Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) sehingga dapat diambil suatu keputusan strategi suatu lembaga.

Proses yang harus dilakukan dalam pembuatan analisis SWOT agar keputusan yang diperoleh lebih tepat perlu melalui berbagai tahapan sebagai berikut (Marimin, 2004) :

1. Tahap pengambilan data yaitu evaluasi faktor eksternal dan internal.

Tahap ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi lembaga tersebut dengan melakukan wawancara pada ahli atau pengambilan data kuantitatif.

2. Tahap analisis yaitu pembuatan matriks internal dan matriks SWOT.

Setelah faktor-faktor eksternal dan internal suatu lembaga dapat diketahui kemudian dilakukan skoring dengan pembobotan dan pemberian rating pada masing-masing faktor berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan skoring tersebut, dapat diketahui posisi internal dan eksternal lembaga tersebut berada pada kuadran I, II, III, atau IV. Selanjutnya dibuat matrik SWOT yang menjelaskan berbagai alternatif yang mungkin untuk strategi lembaga tersebut.

3. Tahap Pengambilan Keputusan

Dari proses analisa SWOT akan menghasilkan beberapa strategi, antara lain :

- a. Strategi SO, yang digunakan untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. (Kuadran I)
- b. Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal. (Kuadran II)
- c. Strategi ST, bertujuan untuk memperkecil dampak yang akan terjadi dari lingkungan eksternal. (Kuadran III)
- d. Strategi WT, bertujuan untuk memperkuat diri dalam usaha untuk memperkecil kelemahan internal dan mengurangi tantangan eksternal. (Kuadran IV)

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat kembali posisi kuadran lembaga tersebut sehingga dapat diketahui kombinasi strategi yang paling tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif kualitatif berusaha mengetahui lebih mendalam dan mendeskriptifkan atau menggambarkan fakta-fakta berupa fenomena awal dengan tujuan mengungkap gejala yang bersifat kualitatif secara lengkap khususnya pada kebijakan pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia terutama UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kondisi *wildlife crime* di Indonesia, implementasi dan dampak kerjasama ASEAN-WEN terhadap upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kebijakan pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia terutama UU Nomor 5 Tahun 1990, kondisi *wildlife crime* di Indonesia, implementasi dan dampak kerjasama ASEAN-WEN, serta perumusan strategi pemberantasan *wildlife crime* yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai *National Focal Point* ASEAN WEN. Jenis data yang diamati dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data/informasi yang diamati adalah isi dan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1990 beserta aturan di bawahnya yang terkait pemberantasan *wildlife crime* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, kondisi *wildlife crime* di Indonesia dan pemberantasannya, implementasi ASEAN WEN, permasalahan, hasil dan dampak kerjasama ASEAN WEN, serta alternatif strategi pemberantasan *wildlife crime*. Jenis data, metode yang digunakan serta sumber data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung mulai Bulan April s/d September 2012.

3.4. Narasumber

Teknik pengambilan sampel narasumber yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa sumber data tersebut berkaitan dengan tujuan penelitian, dalam hal ini untuk mengkaji dampak kerjasama ASEAN WEN dan mengkaji rumusan strategi pemberantasan *wildlife crime* melalui kerjasama ASEAN WEN. Selain itu, berdasarkan studi literatur pendahuluan yang dilakukan, diketahui bahwa kerjasama ASEAN WEN merupakan kerjasama antar lembaga penegak hukum yang meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai dan *CITES Management Authority*. Oleh karena itu narasumber dalam penelitian ini berasal dari instansi yang terkait penegakan hukum dalam upaya pemberantasan *wildlife crime* serta masyarakat yang terlibat dalam perdagangan tumbuhan dan satwa liar, yaitu :

a. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, meliputi :

- 1) Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan
- 2) Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan
- 3) Kasubdit Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan
- 4) Penyidik PNS Kehutanan

b. Direktorat V Tindak Pidana Tertentu, BARESKRIM POLRI, meliputi :

- 1) Kepala Subdit I Tindak Pidana Tertentu

2) Penyidik Polri

- c. Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Ditjen Bea Cukai, diwakili oleh Senior Analyst di Subdit Intelijen.
- d. Direktorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung RI, meliputi :
 - 1) Koordinator Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Satgas Sumber Daya Alam Kejaksaan Agung
 - 2) Koordinator Unit Tindak Pidana terhadap Satwa Liar dan Illegal Fishing, Satgas Sumber Daya Alam Kejaksaan Agung
- e. Pedagang satwa di Pasar Jatinegara, Jakarta

3.5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan secara fisik ataupun wawancara terhadap beberapa narasumber terkait dengan implementasi dan dampak kerjasama ASEAN-WEN terhadap upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia. Sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan
- b. Direktorat V Tindak Pidana Tertentu, BARESKRIM POLRI.
- c. Direktorat Penindakan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan
- d. Direktorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung RI
- e. Pedagang satwa di Pasar Jatinegara, Jakarta

Data sekunder diperoleh dengan melakukan survey institusional pada instansi tersebut di atas. Data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan, buku statistik, hasil survey, berita dari media cetak dan elektronik, dan lain - lain.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan (Lampiran 1), sehingga jawaban dari responden atau nara sumber bersifat terbuka. Wawancara dilakukan untuk mengetahui jenis dan penyebab kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar; kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar; implementasi, hasil yang telah dicapai dan dampak kerjasama ASEAN-WEN terhadap upaya pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia.

b. Observasi

Observasi ini adalah teknik kedua untuk mendapatkan data primer yang dapat berupa hasil diskripsi, gambaran, dan kajian mendalam pada fenomena yang ada. Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan program-program kegiatan, hasil kegiatan, serta fenomena-fenomena lain terkait pemberantasan *wildlife crime* seperti perdagangan satwa liar di Pasar Burung.

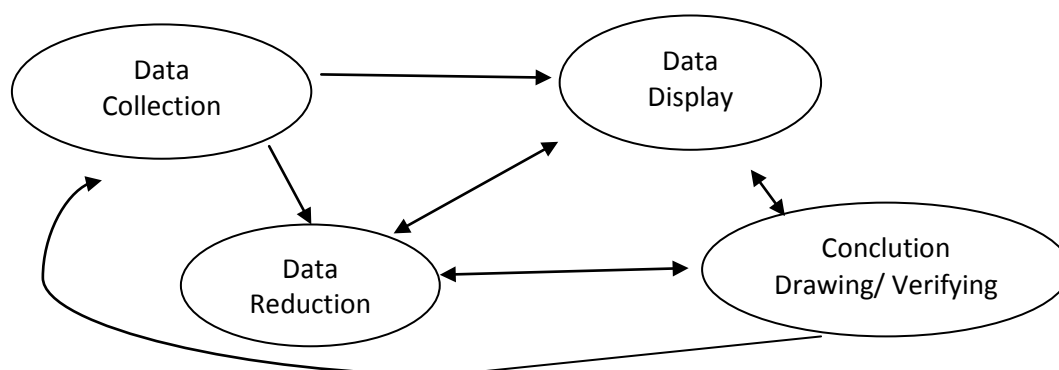
c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dikumpulkan, diorganisasi, ditabulasi, dijabarkan kedalam unit-unit, direduksi, kemudian dibuat kesimpulan. Kegiatan analisis data ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006) aktivitas analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Analisa data tersebut yaitu data reduksi, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*, dengan langkah-langkah seperti pada gambar dibawah ini:



Sumber : Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006)

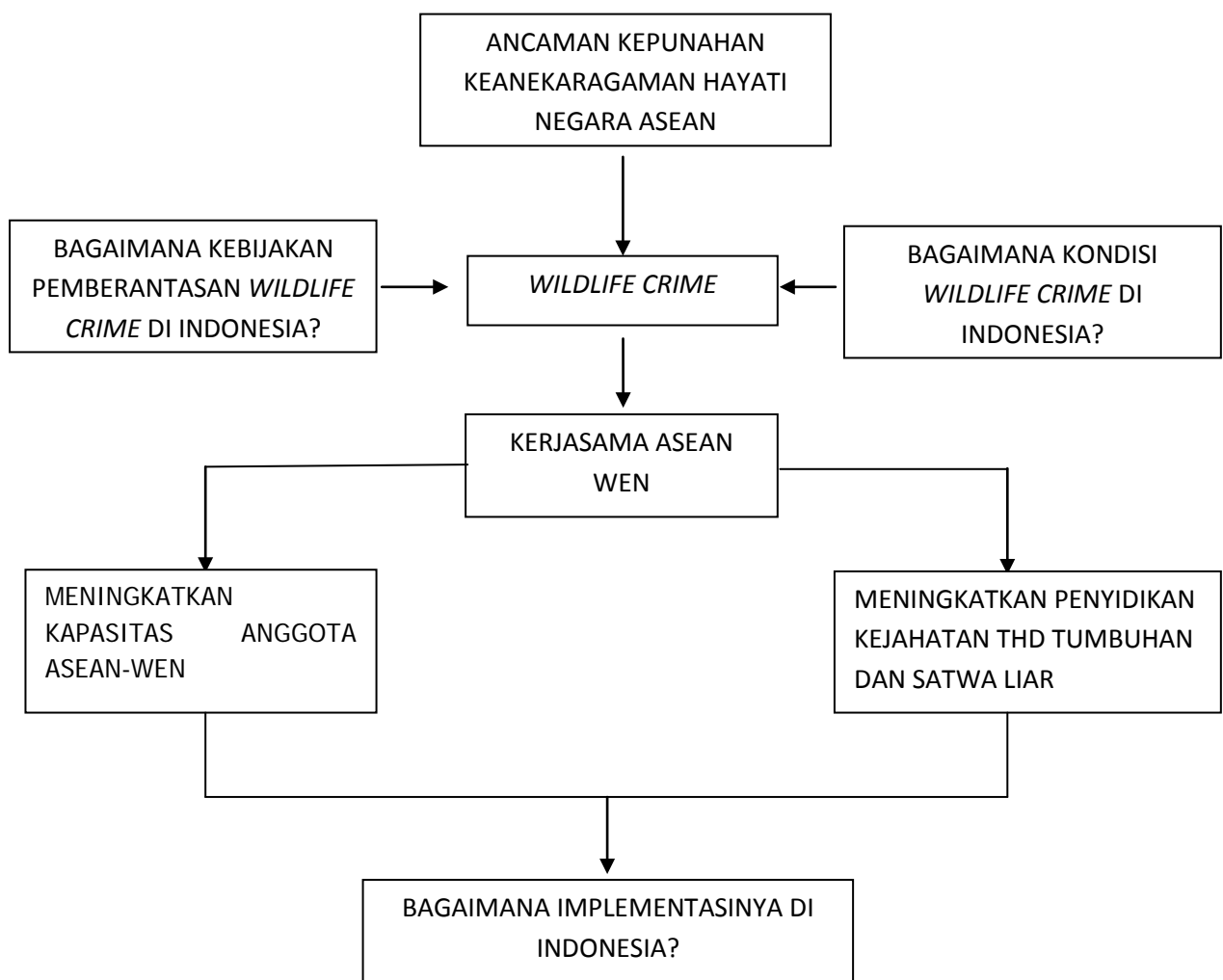
Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data (Interactive Model)

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh diharapkan sebanyak mungkin informasi yang diperoleh, kemudian pada tahap reduksi data, maka analisis yang dilakukan adalah memilih data mana yang penting dan mengeluarkan data yang tidak terkait dengan penelitian. Selanjutnya pada pada tahap penyajian data, data dikumpulkan kemudian di sajikan dalam berbagai bentuk diskriptif, tabulasi, matrik dan sebagainya, sehingga data yang diperoleh menjadi sesuai yang dapat disajikan. Kemudian pada

tahap verifikasi data adalah analisis data pada obyek dan tujuan dari penelitian.

Hasil analisis awal yang meliputi analisis implementasi dan dampak kerjasama ASEAN WEN tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal dalam perumusan alternatif strategi. Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi tersebut adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini dilakukan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai *National Focal Point* ASEAN WEN untuk memperoleh strategi yang paling tepat dilakukan dalam pemberantasan *wildlife crime*.

3.8. Kerangka Pemikiran





Gambar 3.2. Diagram Alir Pemikiran

Tabel 3.1. Jenis data, metode yang digunakan serta sumber data.

No.	Tujuan	Jenis Data	Metode	Analisis	Sumber Data
1.	Mengetahui kebijakan pemberantasan <i>wildlife crime</i> di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 tahun 1990 - PP No. 7 tahun 1999 - PP No. 8 tahun 1999 	- Studi Literatur	Kualitatif	Ditjen PHKA
2.	Mengetahui kondisi <i>wildlife crime</i> di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wildlife Crime</i> di Indonesia - Upaya Pemberantasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Observasi - Dokumentasi 	Kualitatif	Ditjen PHKA, Ditjen Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Pedagang Satwa
3.	Mengkaji dampak kerjasama ASEAN-WEN terhadap upaya pemberantasan <i>Wildlife Crime</i> dan kapasitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi kerjasam ASEAN WEN - Permasalahan - Hasil - Dampak 	- Evaluasi	Kualitatif	Ditjen PHKA, Ditjen Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Pedagang Satwa
4.	Merumuskan usulan strategi implementasi kerjasama ASEAN-WEN dalam mendukung upaya pemberantasan <i>Wildlife Crime</i> di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Alternatif strategi 	Wawancara	SWOT	Ditjen PHKA & Instansi terkait

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Pemberantasan *Wildlife Crime* di Indonesia

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar antara lain penerbitan peraturan perundangan terkait konservasi keanekaragaman hayati yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati), dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam penelitian ini tinjauan kebijakan dilakukan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena peraturan perundangan ini yang melandasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia sesuai fokus penelitian.

Inti dari peraturan tersebut adalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan kelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang, yang dilakukan melalui kegiatan :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.
 - b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilaksanakan di dalam dan diluar kawasan suaka alam.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dilakukan melalui kegiatan :
- a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
 - b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 ini juga diatur larangan-larangan yang terkait perlindungan tumbuhan dan satwa liar, yaitu pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) dengan ketentuan pidana diatur pada Pasal 40 ayat (2) dan (4), dimana pidana maksimal bagi para pelanggar ketentuan tersebut adalah pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100.000.000,- sedangkan pelanggaran karena kelalaian pidana maksimal adalah penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,-. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, vonis bagi para pelaku tindak pidana pelanggaran undang-undang tersebut paling tinggi adalah 4 tahun dan denda Rp. 10.000.000,- pada kasus penyelundupan Penyu di Kalimantan Timur, sedangkan untuk kasus penyelundupan Trenggiling di Palembang yang melibatkan jumlah barang bukti yang lebih banyak, yaitu 13.812 kg Trenggiling hanya mendapat vonis 2,5 tahun dan denda Rp. 5.000.000,-. Untuk kasus-kasus lain, rata-rata vonis yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun penjara, jauh dari hukuman maksimal yang telah diatur.

Dalam rangka mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pemerintah telah

menerbitkan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Sebelum penerbitan undang-undang ini, pemerintah telah meratifikasi konvensi tentang perdagangan jenis fauna dan fauna terancam punah, yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*.

Tujuan dari pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 1999 adalah untuk menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Adapun upaya yang dilakukan dalam pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yaitu penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya, serta pemeliharaan dan pengembangbiakan. Dalam peraturan pemerintah ini telah ditetapkan 294 jenis tumbuhan dan satwa.

Sebagai bagian dari sumber daya alam, tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan oleh manusia, namun pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kelangsungan dan kelestariannya. Secara global perdagangan tumbuhan dan satwa liar telah diatur dalam ketentuan Konvensi Internasional yaitu *Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Di Indonesia pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia juga telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan ini mengatur pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dapat dilaksanakan yaitu dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan;

penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Dalam rangka mengatur pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Kehutanan telah mengatur pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan/Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Keputusan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tertib peredaran guna menunjang kelestarian tumbuhan dan satwa liar melalui pengendalian pengambilan, penangkapan, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengangkutan. Selain itu juga bertujuan untuk menerapkan ketentuan CITES dalam peredaran tumbuhan dan satwa liar di Indonesia.

Dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pengambilan spesimen berasal dari 2 sumber yaitu habitat alam (diluar Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam) dan hasil penangkaran. Untuk spesimen yang berasal dari habitat alam, pengambilan dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Kuota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam berdasarkan data dan informasi ilmiah rekomendasi dari otoritas keilmuan (LIPI) yang berlaku untuk satu tahun. Kuota ini sebagai dasar dalam penerbitan izin tangkap/ambil yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kuota juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin edar, baik izin edar dalam negeri yang dikeluarkan oleh Balai KSDA maupun izin edar luar negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal PHKA.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengatur pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar agar tetap lestari melalui peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengaturan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berada di Direktorat Jenderal PHKA selaku *CITES Management Authority*. Namun demikian, pemanfaatan yang berlebihan dalam bentuk perburuan dan perdagangan ilegal masih terus terjadi.

Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor atau variable yang saling berkaitan satu sama lain. Terkait implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian satwa liar dilindungi di Indonesia ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Teori George C. Edwards III (1980) dalam Subarsono (2006) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Variabel pertama dari keberhasilan implementasi adalah komunikasi. Pihak implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan pelestarian tumbuhan dan satwa liar untuk kemudian ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Dalam implementasi kebijakan pelestarian tumbuhan dan satwa liar (TSL), tujuan dari perlindungan spesies kurang dapat dimengerti dan dirasakan oleh masyarakat awam. Masyarakat akan lebih mudah memahami jika perlindungan spesies akan memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi mereka. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya penghargaan atas keberadaan spesies TSL, sehingga eksploitasi TSL untuk kepentingan ekonomi terus menerus terjadi. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus sebagai bentuk komunikasi tentang tujuan dari perlindungan/konservasi jenis, manfaat keberadaan dan kelestarian TSL bagi kelangsungan hidup manusia, jenis-jenis TSL yang dilindungi, dan mekanisme pemanfaatan yang berazas lestari.

Variabel kedua menurut Teori George C. Edwards III adalah sumberdaya, sumberdaya ini dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Dalam implementasi kebijakan perlindungan TSL dilindungi di Indonesia yang menjadi *leading sector* adalah Kementerian Kehutanan. Salah satu

permasalahan terkait Sumber Daya Manusia adalah kurangnya petugas di lapangan dan kurangnya kapasitas petugas di lapangan terutama dalam pengenalan dan identifikasi jenis satwa dilindungi. Hal tersebut menyebabkan lemahnya pengawasan di lapangan terutama terkait kegiatan penyelundupan TSL di perbatasan. Sebenarnya untuk mengatasi permasalahan tersebut Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti Kepolisian, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, Badan Karantina Tumbuhan dan Hewan, dan LIPI. Beberapa kasus perdagangan dan penyelundupan berhasil terungkap, seperti penyelundupan trenggiling dan berhasil diproses secara hukum. Namun demikian, modus kejahatan terhadap TSL terus berkembang dan Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak pintu keluar ilegal di perbatasan, sehingga perlu peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM dan Sarpras untuk pengawasan di lapangan.

Selanjutnya, variabel ketiga yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis (Subarsono, 2006). Salah satu penyebab maraknya perdagangan ilegal satwa dilindungi adalah untuk tujuan peliharaan dan koleksi. Seringkali kolektor satwa ini adalah orang-orang berpengaruh baik karena kedudukan dan jabatannya maupun karena kekayaannya. Hal ini menjadi tantangan bagi implementor kebijakan untuk tetap menjaga komitmen dan kejujuran sehingga aturan dapat ditegakkan. Komitmen juga diperlukan semua aparat dalam penegakan hukum. Kasus penyelundupan 13,8 ton trenggiling di Sumatera Selatan hanya dihukum 2,5 tahun penjara. Untuk itu, perlu komitmen dari aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku perdagangan ilegal TSL dilindungi.

Selain ketiga variabel di atas, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel struktur birokrasi. Salah satu dari aspek struktur

yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP), SOP inilah yang akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dalam implementasi kebijakan perlindungan TSL, perlu disusun SOP terutama bagi implementor di lapangan. SOP itu antara lain tentang prosedur pengawasan, prosedur pemeriksaan dokumen kelengkapan dalam perdagangan satwa, prosedur penanganan satwa sitaan, serta prosedur kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

4.2. Kondisi *Wildlife Crime* di Indonesia

4.2.1. *Wildlife Crime* di Indonesia

Wildlife crime atau sering diartikan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia telah menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Di Indonesia *wildlife crime* biasanya ditujukan untuk kejahatan terhadap satwa liar dan tumbuhan yang tidak berkayu, sedangkan untuk kejahatan yang berkaitan dengan tumbuhan berkayu biasa disebut dengan *illegal logging* atau pembalakan liar, meskipun keduanya termasuk dalam kelompok tumbuhan. Di Kementerian Kehutanan klasifikasi tindak kejahatan terhadap *wildlife* dibagi dua yaitu kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dan *illegal logging* atau pembalakan liar. Dalam penegakan hukumnya untuk kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar tuntutannya berdasar UU Nomor 5 Tahun 1990, sedangkan untuk kasus *illegal logging* berdasar UU Nomor 41 tahun 1999. Pada penelitian ini fokus untuk *wildlife crime* adalah kejahatan terhadap satwa liar karena kasus kejahatan yang terjadi lebih banyak terjadi pada satwa liar.

Maraknya kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia dilatarbelakangi adanya permintaan pasar terhadap tumbuhan dan satwa liar, sebagaimana disampaikan oleh Senior Analis Dit. Penyidikan dan Penindakan, Ditjen Bea Cukai sebagai berikut :

“faktor pendorong terjadinya kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah permintaan, baik dari dalam negeri maupun dari dalam negeri, namun faktor yang lebih

tinggi adalah dari luar negeri, seperti gaharu, trenggiling, reptil lebih banyak untuk memenuhi permintaan luar negeri”

Selanjutnya menurut Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II, Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan dinyatakan :

“permintaan terhadap tumbuhan dan satwa liar dipicu karena hobby memelihara satwa, untuk gengsi, bahan obat tradisional, dan adanya budaya tertentu atau mitos-mitos yang berkembang dalam pemanfaatan TSL seperti untuk menambah kekuatan dan sebagainya”

Memelihara hewan dan merawat tanaman merupakan salah satu kegemaran/hobby manusia. Namun demikian, sebagian orang memiliki kegemaran untuk memelihara jenis-jenis tertentu dari tumbuhan atau satwa liar, seperti memelihara burung kakak tua, primata, atau koleksi tanaman anggrek, kantung semar, dan sebagainya. Semakin langka tumbuhan dan satwa liar yang berhasil dikoleksi, maka kepuasan seseorang akan kegemarannya tersebut semakin tinggi. Di dunia maya banyak sekali forum atau kumpulan orang-orang yang memiliki hobby yang sama yaitu memelihara satwa liar, seperti forum pecinta burung paruh bengkok, elang, burung hantu, dan sebagainya. Kegemaran inilah yang kemudian memicu maraknya perdagangan dan perburuan tumbuhan dan satwa liar terutama jenis-jenis yang langka.

Berkaitan dengan kegemaran/hobby untuk memelihara tumbuhan dan satwa liar, sejumlah orang merasa status sosial atau gengsinya akan naik jika dapat mengoleksi jenis tumbuhan atau satwa liar tertentu atau bagian tubuhnya. Orang akan merasa bergengsi ketika di salah satu sudut ruangan rumahnya terdapat dua gading gajah yang besar, atau offset Harimau Sumatera, Burung Cenderawasih, dan sebagainya. Ini dikarenakan hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan hal tersebut, sehingga status sosial dan gengsinya akan naik. Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar juga menjadi bagian dari budaya masyarakat, seperti bulu Cenderawasih, kepala Harimau, bulu Merak, kerapas Penyu menjadi bagian dari ritual budaya sebagian masyarakat. Selain itu, berkembang juga mitos di masyarakat jika menggunakan/mengonsumsi

bagian-bagian tertentu dari satwa liar dapat meningkatkan kekuatan, kewibawaan, dan sebagainya. Seperti misalnya dengan memiliki kumis Harimau akan menambah kewibawaan, mengkonsumsi tangkur buaya akan menambah kekuatan, dan lain-lain

Selain ketiga hal tersebut, faktor pemicu tingginya permintaan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah sebagai bahan obat, terutama obat tradisional. Banyak jenis tumbuhan dan satwa maupun bagian tubuhnya yang secara empiris dipercaya memiliki khasiat obat. Penelitian yang dilakukan Putra dkk (2008) di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) ditemukan 39 jenis satwa yang digunakan sebagai obat oleh masyarakat sekitar TNBK. Dari 39 jenis tersebut, Beruang Madu merupakan jenis yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena diyakini empedunya dapat dijadikan sebagai obat untuk luka dalam akibat patah tulang, terkilir dan kecelakaan ringan. Padahal Beruang Madu termasuk jenis yang dilindungi dan masuk dalam Apendiks I CITES. Selain masyarakat lokal, di beberapa tempat seperti di China banyak sekali obat-obat tradisional yang berbahan dasar jenis tumbuhan maupun satwa, seperti tulang Harimau, sisik Trenggiling, tanduk Rusa, cula Badak, dan sebagainya. Banyak kasus penyelundupan sisik trenggiling maupun tulang Harimau yang berasal dari Indonesia dengan tujuan China. Beberapa contoh gambar kemasan obat tradisional China yang berbahan dasar tumbuhan dan satwa liar tersaji dalam Gambar 4.1.



Sumber : Data Primer, 2012

Gambar 4.1. Obat Tradisional China

Keempat faktor ini yang menyebabkan tumbuhan dan satwa liar menjadi komoditas perdagangan. Harga satwa liar akan lebih tinggi bila setiap bagian dari satwa liar tersebut dapat dijual untuk daging (*bushmeat*), ramuan tradisi, bahan material bangunan dan perhiasan, satwa peliharaan, kebun binatang, dan koleksi pribadi (Supriatna, 2008). Perdagangan berbagai jenis tumbuhan dan satwa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia baik legal maupun ilegal terus berlangsung, sehingga memicu terjadinya perburuan dan eksploitasi terhadap tumbuhan dan satwa liar.

Menurut Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I, Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan, modus dari perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar antara lain perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi maupun bagian tubuhnya, perdagangan tumbuhan satwa liar tanpa ijin, perdagangan tumbuhan dan satwa liar dengan dokumen yang tidak sah, dan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar atau bagian tubuhnya. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Senior Analis di Dit. Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai, sebagai berikut :

“modus penyelundupan satwa liar secara garis besar ada dua yaitu komoditi tersebut tidak diberitahukan sebagai jenis satwa liar dan diberitahukan tetapi dengan nama lain, misalnya dalam ijin disebutkan sebagai ikan beku namun kenyataannya adalah daging trenggiling”

Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar juga memicu perburuan/pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi, karena semakin langka dan dilindungi nilainya dalam perdagangan akan semakin tinggi, misalnya perdagangan kulit Harimau. Tinggi atau rendahnya harga kulit harimau di pasar gelap ditentukan berdasarkan ukurannya, semakin panjang ukurannya, semakin mahal. Untuk kulit harimau dengan panjang dua meter (diukur dari bagian kepala hingga pangkal ekor) harganya mencapai Rp 50 juta, jika sudah dalam bentuk opsetan, harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah (Tribun Jambi, 2012). Jenis satwa liar, terutama yang dilindungi, yang sering dijadikan komoditas perdagangan ilegal disajikan dalam Tabel 4.1:

Tabel 4.1. Jenis Satwa Dilindungi di Indonesia Yang Sering Diperdagangkan

No.	Jenis Satwa	Ciri yang menarik		
		Langka	Indah	Manfaat
1.	Trenggiling (<i>Manis javanica</i>)	√		√
2.	Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>)	√	√	√
3.	Gajah (<i>Elephas indicus</i>)	√	√	
4.	Orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>)	√	√	
5.	Burung Cenderawasih (<i>Paradiseidae</i>)	√	√	
6.	Burung jenis Elang	√	√	
7.	Burung jenis Nuri	√	√	
8.	Burung jenis Kakatua	√	√	
9.	Berbagai jenis Penyu	√	√	√

Sumber : Dit. Penyidikan dan Pengaman Hutan, 2012

Menurut Weston dkk (2009), sejarah perdagangan burung *parrots* (burung paruh bengkok) telah ada sejak ribuan tahun lalu, karena orang selalu ingin memiliki sesuatu yang indah. Selanjutnya disebutkan Alexander Agung, Marie Antoinette, Henry VIII, dan Theodore Roosevelt semua memiliki burung *parrots*. Selain itu, kerangka sisa-sisa Scarlet macaw (*Ara macao*) dapat ditemukan di situs pemakaman dari orang-orang di Mogollon Arizona Selatan. Dalam sebuah penelitian terhadap Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*) yang dilakukan Nijman, dkk. (2009) disebutkan bahwa setelah ditetapkan sebagai Satwa Langka Nasional, perdagangan Elang Jawa di berbagai Pasar Burung meningkat, bahkan ada yang ditemukan diselundupkan ke luar negeri (Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan).

Dengan melihat fenomena seperti di atas, penetapan suatu jenis satwa menjadi satwa langka/dilindungi dapat menimbulkan dua akibat yang berlawanan, dimana tujuan awalnya adalah untuk memberikan perhatian terhadap upaya konservasinya namun juga dapat menyebabkan satwa tersebut dikenal oleh masyarakat dan selanjutnya ada keinginan dari sebagian masyarakat untuk memburu dan memilikinya. Hal ini kemudian menjadikan permintaan jenis-jenis tersebut juga akan semakin meningkat dan perdagangan ilegal akan terjadi dengan nilai yang semakin tinggi.

Perdagangan satwa liar yang terdaftar dalam CITES dari Asia Tenggara termasuk Indonesia melibatkan jutaan hewan pertahun, dengan mayoritas satwa yang berasal dari tangkapan alam (Nijman, 2009). Selanjutnya Nijman (2009) juga menyatakan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang tidak lestari merupakan salah satu dari tantangan utama konservasi di Asia. Perdagangan satwa liar terutama jenis dilindungi juga marak di Indonesia, misalnya pada bulan Mei 2011 percobaan penyelundupan sebanyak 7.453,08 kg trenggiling beku dan 64,6 kg sisik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan tujuan Vietnam (KOMPAS, 2011) dan pada Juli 2011 penyelundupan sebanyak 1.732 kg Trenggiling beku dan 380 kg sisik di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dengan tujuan Singapura (Okezone, 2011). Populasi Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) terus mengalami penyusutan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 15 tahun belakangan, salah satu penyebabnya adalah perburuan dan perdagangan ilegal Harimau Sumatera dan bagian-bagian tubuhnya, dan sejak tahun 2005 di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat berhasil diamankan 18 kulit Harimau Sumatera (Tribun Jambi, 2012).

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tak terkendali dapat mengakibatkan kepunahan jenis tertentu yang berakibat terganggunya keseimbangan ekosistem yang ada. Menurut Mangunjaya (2006) jika salah satu jenis musnah, sistem mata rantai makanan yang ada di alam menjadi kacau dan hubungan predator dengan mangsa menjadi tidak seimbang, sebagai akibat misalnya timbul hama yang tidak dikehendaki karena tingginya populasi jenis tertentu akibat tidak terkontrol oleh predator alaminya. Tingginya keanekaragaman hayati juga berarti banyaknya pilihan untuk pengembangan ilmu dan teknologi dalam menghadapi perubahan di masa depan. Jika tatanan lingkungan yang hanya terdiri dari sedikit jenis hayati, sangat peka dan mudah terganggu keseimbangannya, semakin beraneka ragam sumber alam hayati, semakin stabil tatanan lingkungan tersebut (Irwan, 1996). Oleh karena itu,

perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar merupakan bentuk *wildlife crime* yang sangat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati yang berarti juga mengancam kelestarian lingkungan.

Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar merupakan bisnis yang besar, melibatkan banyak orang dan memiliki jaringan yang panjang dan rumit, mulai dari pemburu di lapangan, pengumpul, dan pedagang besar. Nilai/omzet perdagangan tumbuhan dan satwa ilegal di dunia mencapai US \$ 20 Milyar per tahun (Pokja Kebijakan Konservasi, 2008). Nilai pasar gelap dari penyelundupan tumbuhan dan satwa liar yang berhasil ditangkap di regional ASEAN senilai US\$ 40juta (ASEAN WEN, 2009). Tingginya nilai ekonomi mengakibatkan banyak masyarakat lokal yang mengandalkan perburuan dan penjualan satwa liar sebagai mata pencaharian. Harga yang dibayarkan kepada pemburu lokal dibanding harga di pasaran internasional sangat jauh berbeda, seperti pada perdagangan trenggiling, harga pada masing-masing tingkat pelaku sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. Harga Perdagangan Trenggiling

No	Tingkat Pelaku	Harga (Rp/kg)
1.	Pemburu Lokal	
2.	Pengumpul Pertama	15.000 – 20.000 ¹
3.	Pengumpul Besar	50.000 – 100.000 ¹ 250.000 ²
4.	Pasar Internasional	1.000.000 ² 1 US \$/keping Sisik ²

Sumber : 1 : Wirdati (2008) dalam Semiadi, dkk (2008); 2 :Direktorat PPH (2011)

Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat lokal baik sebagai pemburu maupun pengumpul pertama cukup besar bila dibandingkan dengan biaya hidup orang lokal. Menurut Wirdateti (2008) dalam Semiadi, dkk, (2008) biaya hidup orang lokal saat itu adalah sekitar Rp. 30.000 per hari. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat lokal terus melakukan perburuan untuk mengejar keuntungan ekonomi. Menurut Kasubdit Penyidikan dan Pengaman Wilayah I, akibat perdagangan ilegal Trenggiling dalam kurun waktu 2006 – 2011, negara dirugikan sebesar Rp 38,45 Milyar.

Besarnya keuntungan nilai ekonomi yang diperoleh dari perdagangan ilegal satwa liar dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama sekitar hutan menyebabkan perburuan tumbuhan dan satwa terus berlangsung. Menurut data di Kementerian Kehutanan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa-desa di dalam dan sekitar hutan yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan cukup banyak, yaitu sekitar 48,8 juta orang, 10,2 juta orang diantaranya tergolong miskin. Berdasarkan data register perkara di Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, dapat terlihat bahwa pada kurun waktu 2008 – 2011 terdapat 98 kasus perburuan/pengambilan hasil hutan ilegal oleh masyarakat lokal dari total kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar sebanyak 256 kasus. Jumlah kasus selengkapnya disajikan dalam Tabel 4.3 :

Tabel 4.3. Kasus Kejahatan terhadap TSL oleh Masyarakat Lokal tahun 2008–2011.

No.	Tahun	Kategori Kasus	Lokasi	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1.	2008	Perburuan ilegal	Kawasan Hutan & Kawasan Konservasi	11	26
		Pengangkutan ilegal TSL	Sekitar Kawasan Konservasi	4	5
		Pencurian Hasil Hutan	Kawasan Hutan & Kawasan Konservasi	7	14
2.	2009	Perburuan ilegal	Kawasan Hutan & Kawasan Konservasi	27	42
		Pengangkutan ilegal TSL	Sekitar Kawasan Konservasi	5	9
		Pencurian Hasil Hutan	Kawasan Hutan & Kawasan Konservasi	10	11
3.	2010	Perburuan ilegal	Kawasan Hutan & Kawasan Konservasi	15	19
		Pengangkutan ilegal TSL	Sekitar Kawasan Konservasi	4	5
4.	2011	Perburuan ilegal	Kawasan Hutan & Kawasan Konservasi	15	16
Jumlah Total				98	147

Sumber : Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan 2012, diolah

Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar dengan memanfaatkannya secara lestari, tidak hanya untuk kepentingan

ekonomi jangka pendek. Pemberdayaan masyarakat terutama sekitar hutan juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan. Selain itu penegakan hukum juga penting dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan ilegal dan menghentikan eksploitasi sumber daya alam.

4.2.2. Kewenangan Pemberantasan *Wildlife crime*

Instansi yang menjadi *focal point* dalam pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dan sebagai CITES *Management Authority* adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal PHKA memiliki kewenangan terhadap semua flora dan fauna terestrial dan spesies perairan laut yang masuk dalam Apendiks CITES. Direktorat Jenderal PHKA memiliki Unit Pelaksana Teknis yang ada di daerah yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Taman Nasional (BTN). Balai KSDA bertanggungjawab terhadap regulasi peredaran tumbuhan dan satwa liar baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi pada tingkat provinsi. Balai Taman Nasional bertanggung jawab terhadap konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam kawasan Taman Nasional. Kedua lembaga tersebut juga berperan sebagai perwakilan Direktorat Jenderal PHKA dalam penegakan hukum.

Selain Direktorat Jenderal PHKA, kewenangan penegakan hukum kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah pada Kepolisian, khususnya pada Direktorat V Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Badan Reserse dan Kriminal, Mabes Polri. Direktorat V Tipiter bertanggungjawab terhadap penegakan hukum antara lain bidang lingkungan dan sumber daya alam. Direktorat V Tipiter memiliki kewenangan dalam lingkup nasional, sehingga dapat beroperasi di seluruh Indonesia, namun hanya untuk kasus-kasus yang serius dan komplek atau ada permintaan dari Kepolisian daerah atau instansi yang lain untuk melakukan pendampingan.

Dalam pemberantasan *wildlife crime*, instansi lain yang berperan adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Ditjen Bea Cukai dalam memberantas peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar dilakukan melalui implementasi prosedur kepabeanan. Di bawah Ditjen Bea Cukai terdapat Direktorat Penindakan dan Penyidikan, yang bertanggungjawab untuk melakukan penyelidikan, perencanaan operasi, dan penyitaan. Direktorat ini tidak memiliki unit khusus untuk menangani peredaran tumbuhan dan satwa liar, namun hal tersebut digabungkan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari baik pada tingkat daerah maupun pusat. Koordinasi dan kerjasama dari ketiga instansi tersebut sangat diperlukan untuk mensinergiskan upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia. Selain itu perlu juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

4.3. ASEAN Wildlife Enforcement Network

Gagasan pembentukan ASEAN WEN muncul saat pertemuan menteri-menteri negara ASEAN yang bertanggung jawab terhadap implementasi CITES di Bangkok pada tanggal 11 Oktober 2004. Pada pertemuan tersebut dikeluarkan pernyataan bersama bahwa negara-negara ASEAN komitmen untuk bekerjasama dalam peningkatan implementasi CITES termasuk penegakan hukum. Selanjutnya pada pertemuan ASEAN Expert Group on CITES (AEG on CITES) di Jakarta pada tahun 2005 disusun dan diadopsi *ASEAN Regional Action Plane on Trade in Wild Fauna and Flora (2005 – 2010)*. Dalam rencana aksi tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuannya (tujuan 2) adalah mendorong terbentuknya jejaring lembaga penegak hukum di negara ASEAN untuk memberantas perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Sebagai tindaklanjutnya, dalam pertemuan menteri-menteri negara ASEAN yang bertanggung jawab terhadap implementasi CITES pada Desember 2005 diluncurkan *ASEAN Wildlife Enforcement Network*.

Berdasarkan proses pembentukan ASEAN WEN tersebut dapat dilihat bahwa hal yang melatarbelakanginya adalah penguatan kapasitas kelembagaan penegakan hukum di regional ASEAN untuk memerangi perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Perdagangan tersebut yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati negara-negara ASEAN sebagai negara asal dari pemanfaatan sumber daya alam hayati.

4.3.1. Implementasi ASEAN WEN di Indonesia

Dalam keikutsertaannya pada jaringan kerjasama ASEAN WEN, Indonesia telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang terkait dengan pemberantasan *wildlife crime* sebagaimana diungkapkan oleh Kasubdit Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan sebagai berikut :

“berbagai program dan kegiatan dalam rangka kerjasama ASEAN WEN telah dilakukan oleh Indonesia, yaitu mengikuti pertemuan tahunan ASEAN WEN, membentuk National Task Force ASEAN WEN, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan kampanye, serta operasi-operasi penegakan hukum”

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi pada laporan-laporan Pemerintah Indonesia pada pelaksanaan pertemuan tahunan ASEAN WEN, dapat diketahui implementasi kerjasama ASEAN WEN dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Ikut serta dan berperan aktif dalam *Annual Meeting* ASEAN WEN.

Sebagaimana uraian terdahulu, sejak dibentuk sampai saat ini ASEAN WEN telah mengadakan pertemuan tahunan selama 7 (tujuh) kali. Indonesia selalu mengikuti dan berperan secara aktif dalam pertemuan-pertemuan tersebut, bahkan di tahun kedua Indonesia bertindak selaku tuan rumah. Dalam setiap pertemuan, tiap negara anggota melaporkan kegiatan dan capaian dalam upaya pemberantasan *wildlife crime*. Selain laporan dalam pertemuan tahunan tersebut, setiap triwulan juga diwajibkan melaporkan hasil-hasil operasi penegakan hukum yang akan ditampilkan di website ASEAN WEN.

Hal tersebut tentu dapat menjadi pendorong bagi semua negara anggota untuk terus melakukan upaya dalam memerangi *wildlife crime*. Pertemuan ini juga dapat menjadi media pertukaran informasi tentang keberhasilan masing-masing negara anggota sehingga keberhasilan tersebut dapat diterapkan di masing-masing negara. Dalam menghadiri pertemuan ini tidak semua wakil dari instansi yang masuk dalam *Task Force* ikut sebagai delegasi Indonesia. Direktorat Jenderal PHKA selaku *National focal point* selalu mengikuti pertemuan tersebut, sedangkan instansi lain yang cukup aktif mengikuti hanya Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan penganggaran untuk keberangkatan delegasi Indonesia dibebankan pada masing-masing instansi, dan tidak semua instansi mengalokasikan anggaran tersebut.

2. Pembentukan *National Task Force* ASEAN WEN

Pembentukan *Task Force* ASEAN WEN di masing-masing negara anggota ASEAN merupakan adopsi dari keberhasilan di Philipina yang memiliki *National Anti Environment Crime Task Force* (NAECTF). NAECTF ini beranggotakan instansi-instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk menanggulangi kejahatan lingkungan yang meliputi kehutanan, tumbuhan dan satwa liar, sumber daya pantai dan kelautan, serta polusi. Indonesia telah membentuk *National Task Force* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA selaku *National Focal Point* pada tahun 2008 yang diketuai oleh Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan dan beranggotakan instansi yang terkait dengan pemberantasan *wildlife crime* dan penegakan hukum di Indonesia yaitu Ditjen Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Karantina, Menkopolhukam, dan TNI AL. Namun demikian pembentukan *Task Force* ini kurang berjalan efektif karena tidak semua anggota terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembentukan *Task Force* untuk mensinergiskan upaya pemberantasan *wildlife crime* dari instansi terkait belum dapat tercapai. Pada tahun pertama dibentuk, *Task*

Force bertemu untuk menyusun rencana kegiatan dan kemudian tahun berikutnya dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk selanjutnya kegiatan *Task Force* kurang berjalan. Sesuai tugas yang ditetapkan dalam pembentukan National Task Force ASEAN WEN dapat dilakukan penilaian sebagaimana tersaji pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Tugas *National Task Force* ASEAN WEN

No	Tugas	Penilaian Keberhasilan		
		Kurang	Cukup	Baik
1.	Identifikasi kasus pelanggaran peredaran TSL		√	
2.	Pemantauan perkembangan penanganan kasus bidang kejahatan TSL		√	
3.	Percepatan penanganan dan penyelesaian kasus perkara peredaran ilegal TSL		√	
4.	Menyusun rencana tahunan dan country report	√		
5.	Publikasi dan sosialisasi hasil penanganan kasus dan perkara peredaran ilegal TSL	√		
6.	Berbagi informasi terkait peredaran ilegal TSL		√	
7.	Melaksanakan kerjasama antar Task Force ASEAN WEN dan pihak terkait dalam investigasi peredaran ilegal TSL		√	
8.	Menyelenggarakan pertemuan berkala	√		

Sumber : data primer, 2012

Berdasarkan hasil wawancara, faktor utama yang menyebabkan *Task Force* ini belum berjalan sesuai yang diharapkan adalah *Task Force* ini sepertinya hanya bersifat administratif untuk memenuhi amanat dari ASEAN WEN. *Task Force* ini belum berjalan efektif sesuai yang diharapkan dan tidak semua instansi yang terlibat berperan secara aktif. Salah satu instansi yang menjadi anggota *Task Force*, yaitu Direktorat Penindakan Jampidum – Kejaksaan Agung pada tahun 2010 mengalami perubahan struktur organisasi dan perubahan kewenangan serta tupoksi, namun hal ini tidak terkomunikasikan sehingga berpengaruh pada partisipasi dan keikutsertaan Kejaksaan pada *Task Force*.

Apabila dilihat dari keanggotannya, perwakilan dari tiap instansi adalah para pimpinan pengambil kebijakan dari masing-masing instansi. Pada awalnya dengan keanggotaan seperti ini diharapkan agar kebijakan yang ada dalam kerjasama tersebut dapat

terimplementasi di masing-masing instansi yang bertanggungjawab dalam pemberantasan *wildlife crime*. Namun demikian kondisi yang terjadi adalah *Task Force* yang dibentuk menjadi kurang bersifat operasional dan tidak berjalan efektif. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim :

"Keanggotaan Task Force ini kurang bersifat operasional, seperti instansi kami diwakili oleh Direktur Tipiter, dimana saat ini sedang fokus untuk tugas lain yang lebih prioritas yaitu menangani kasus pertambangan dan perkebunan ilegal"

Hal tersebut juga diungkapkan oleh narasumber dari Ditjen Bea Cukai, yang mengatakan bahwa :

"Harusnya keanggotaan Task Force seperti ini bukan diisi oleh orang yang berada pada level strategis, namun yang berada pada level dibawahnya paling tidak level analis, sehingga mungkin dapat lebih berjalan efektif"

Sebagai perbandingan, *National Task Force* di Brunei Darussalam pada tahun 2010 telah melakukan Patroli Gabungan sebanyak 66 kali, di Malaysia dan Thailand dalam keanggotaan *National Task Force* melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (ASEAN WEN, 2011).

Selain hal tersebut diatas, *Task Force* ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal dan lebih merupakan forum komunikasi dan koordinasi dari instansi yang memiliki keterkaitan dalam pemberantasan *wildlife crime*. *Task Force* ini bukan sebuah lembaga yang memiliki kebijakan penganggaran sendiri, sehingga perlu ada komitmen tinggi dari semua instansi anggota agar kegiatan *Task Force* dapat berjalan dengan baik. Hal ini berbeda dengan Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan memiliki anggaran sendiri untuk mendukung kegiatannya, seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Satgas REDD+. Satgas REDD+ antara lain telah berhasil menyusun Strategi Nasional REDD+ dan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum antara lain berhasil membongkar mafia di Lembaga Permayarakatan.

3. Peningkatan Kapasitas

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, telah dilakukan pelatihan, workshop, dan seminar yang terkait dengan pemberantasan *wildlife crime*. Kegiatan tersebut antara lain :

- Pelatihan penyidikan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang diadakan oleh Kepolisian bekerjasama dengan USAID pada bulan April 2007.
- Workshop tentang proses peradilan yang berkaitan dengan *wildlife crime* yang diikuti oleh para penegak hukum termasuk dari Departemen Kehakiman yang diadakan oleh CITES *Management Authority* bekerjasama dengan WWF Indonesia pada bulan April 2007.
- Seminar nasional tentang *wildlife crime* di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan TRAFFIC.
- Pelatihan tentang perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar untuk petugas Bea Cukai yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret s/d 2 april 2009.
- Pelatihan Intelijen untuk penegakan hukum di negara – negara yang menjadi tempat sebaran Harimau , diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 November s/d 4 Desember 2011. Pelatihan ini diselenggarakan oleh kerjasama CITES, INTERPOL, dan Kementerian Kehutanan.
- Perwakilan Polisi Kehutanan Indonesia pada *Demonstration Enforcement Ranger Training Course in Khao Yai Regional Nature Protection*, Thailand. Sekaligus menghadiri *Workshop of Protected Area Protection and Enforcement Managers*, di Pattaya, Thailand.
- *Enforcement Ranger Training Course* untuk 30 orang anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) pada tanggal 17 – 30 September 2010 di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango,

kerjasama Kementerian Kehutanan dengan Freeland Foundation /ASEANWEN Support Program.

- Pelatihan Intelijen dan Ke-Polhut-an pada tanggal 23 November s/d 6 Desember 2010.
- Pelatihan PPNS Eksekutif yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober – 9 November 2010 di Bogor dan diikuti oleh 30 peserta dari Unit Pelaksana Teknis Ditjen PHKA. Pelatihan ini merupakan kerjasama Kementerian Kehutanan dan POLRI.
- Pelatihan Teknis bagi Polisi Kehutanan di 2 (dua) Propinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.
- Menghadiri the Environmental Crime Conference pada tanggal 12 – 18 September 2010 yang diselenggarakan di Lyon, Prancis.
- Menghadiri 5th COP UNCTOC Meeting yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2010 di Vienna, Austria.
- *Training of Trainer CITES Policies and Identification of Threatened Species (Reptiles)* pada tanggal 17 – 20 Januari 2011 di Malaysia
- Pelatihan Peningkatan Kemampuan PPNS Kehutanan pada tahun 2011.
- Berpartisipasi pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Negara Anggota ASEAN yang bekerjasama dengan ASEAN-WEN *Program Coordination Unit*.



Sumber : Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, 2011

Gambar 4.2. Pendidikan dan Pelatihan PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan

PPNS dan Polisi Kehutanan merupakan tenaga pengamanan di Kementerian Kehutanan yang berperan dalam proses penegakan

hukum, untuk itu perlu ditingkatkan kapasitasnya baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Segi kuantitas perlu ditingkatkan untuk memenuhi kekurangan SDM dan dari segi kualitas dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bagi PPNS dan Polhut dalam mengungkap dan menginvestigasi setiap kasus kejahatan yang terjadi.

4. Peningkatan kepedulian masyarakat

Salah satu hal yang menjadi kendala dalam pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah kurangnya kepedulian masyarakat umum terhadap pentingnya kelestarian tumbuhan dan satwa liar. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tersebut upaya yang dilakukan pemerintah yaitu :

- Sosialisasi peraturan perundangan
- Sosialisasi konvensi CITES dan pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar
- Pembuatan poster-poster tentang larangan perburuan satwa dan penebangan liar, jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, dll.
- Pembuatan buku agenda yang memuat materi sosialisasi tentang ASEAN WEN, peraturan perundangan, dan jenis-jenis satwa dilindungi
- Distribusi buku identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang disusun oleh ASEAN WEN PCU bekerjasama dengan TRAFFIC.



Sumber : Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan, 2012

Gambar 4.3. Contoh Materi Sosialisasi dan Kampanye

Upaya-upaya peningkatan kepedulian masyarakat tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Distribusi materi-

materi sosialisai tersebut hanya mencakup lingkup internal instansi yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat masih sangat kurang. Penyuluhan, sosialisasi dan kampanye seharusnya dilakukan di Pasar–pasar Burung/Hewan, seperti yang dilakukan di Thailand, dimana setiap minggu dilakukan kampanye di “Chatuchak Weekend Market” untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membeli tumbuhan dan satwa liar. Penggunaan media elektronik dan media-media sosial di internet untuk kampanye dan sosialisasi belum dilakukan, padahal media-media tersebut yang saat ini mudah untuk menjangkau masyarakat secara luas. Di dunia maya saat ini banyak forum-forum atau kelompok yang memiliki hobby sama yaitu memelihara satwa liar dan juga terdapat perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara online.

5. Operasi pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Operasi ini meliputi kegiatan patroli, penjagaan, operasi represif, dan yustisi. Kegiatan operasi pemberantasan *wildlife crime* dilakukan baik oleh suatu instansi maupun gabungan dari beberapa instansi. Kegiatan tersebut antara lain :
 - Patroli rutin dan penjagaan oleh Polisi Kehutanan di kawasan konservasi maupun di pos-pos rawan peredaran hasil hutan, seperti di Bandara dan Pelabuhan.
 - Penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu keluar internasional oleh petugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.
 - Operasi intelijen baik yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan, Kepolisian, maupun dari Petugas Bea Cukai.
 - Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilakukan secara mandiri oleh Polisi Kehutanan baik di Balai KSDA, Balai Taman Nasional, maupun di Dinas-Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - Operasi gabungan instansi terkait, misalnya Polhut dan Polisi

- Operasi pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar oleh Kepolisian.
- Proses peradilan kasus-kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar, baik yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan maupun Penyidik Polri, bekerjasama dengan pihak Kejaksaan.

Kegiatan operasi ini sangat tergantung pada ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan anggaran. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi-operasi penegakan hukum.

6. Kerjasama Bilateral dengan Negara Anggota ASEAN

Salah satu tujuan dari ASEAN WEN adalah peningkatan kerjasama antara anggota dalam pemberantasan *wildlife crime*. Dalam rangka menindaklanjuti tujuan tersebut, Indonesia telah melakukan kerjasama/dialog dengan negara anggota lain yaitu Vietnam. Hasil dari pertemuan tersebut antara lain :

- Kedua negara akan mengembangkan MoU pemberantasan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar setingkat Menteri yang akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal masing-masing negara
- Kedua negara akan bertukar data, informasi dan pengalaman dalam hal konservasi mamalia (seperti badak, harimau, gajah, trenggiling, dsb). Disamping itu akan ditingkatkan penegakan hukum *wildlife crime* melalui pertukaran informasi, penyidikan bersama dan peningkatan kapasitas serta menguatkan peraturan perundangan terkait konservasi tumbuhan dan satwa liar.
- Dalam upaya pemberian efek jera terhadap pelaku peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, maka kedua negara sepakat untuk memberikan sanksi kepada para pelaku ekspor dan impor tumbuhan dan satwa liar sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Selain dengan vietnam, juga telah terjalin kerjasama dengan Philipina dalam rangka konservasi in-situ Burung Kakatua di Indonesia.

Kerjasama dan dialog dengan Thailand juga telah dilakukan dalam rangka repatriasi Orangutan hasil perdagangan ilegal yang berada di Thailand, meskipun saat ini masih terdapat permasalahan belum terselesaikannya beberapa kasus repatriasi karena terhambat aturan hukum peraturan perundangan di Thailand. Kerjasama bilateral perlu dilakukan terutama untuk negara-negara yang berbatasan langsung atau negara yang menjadi lalu lintas jalur perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar seperti Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand dan Vietnam.

4.3.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia, yaitu :

1. Permasalahan *Wildlife crime* belum menjadi isu strategis.

Kepunahan spesies tumbuhan dan satwa liar oleh sebagian besar masyarakat belum dianggap sebagai permasalahan serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Hal ini terkait dengan manfaat dari keanekaragaman hayati yang belum secara langsung dapat dirasakan oleh manusia. Sebagian besar masyarakat masih menjadikan nilai ekonomi sebagai ukuran dalam menilai manfaat sumber daya alam. Isu konservasi keanekaragaman hayati hanya menjadi isu lapisan masyarakat tertentu. Kondisi ini juga berimbas pada proses penegakan hukum kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Aparat penegak hukum akan mendapatkan penghargaan lebih dari publik ketika misalnya berhasil mengungkap kasus-kasus yang telah menjadi isu strategis seperti narkoba. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber di Direktorat Tipiter Bareskrim sebagai berikut :

“Penghargaan oleh publik yang diperoleh aparat penegak hukum yang berhasil menangkap pembawa 1 ons narkoba akan berbeda dengan aparat hukum yang berhasil menangkap pelaku perdagangan 1 ekor trenggiling”

Ini berarti kepedulian masyarakat akan permasalahan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar masih rendah, sehingga permasalahan ini belum menjadi isu strategis nasional. Kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor bahwa ada kesan pembiaran terhadap para pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang ada di pasar-pasar hewan yang banyak terdapat di kota-kota besar, seperti Jakarta. Petugas jarang melakukan razia di pasar-pasar tersebut, seperti yang diungkapkan salah satu pedagang satwa di Pasar Jatinegara berikut :

“petugas jarang melakukan razia, tapi dulu pernah ada operasi dan ada yang masuk penjara”

Pada waktu penelitian masih ditemukan adanya perdagangan satwa-satwa yang dilindungi maupun yang masuk dalam Appendiks CITES, seperti di Pasar Burung Jatinegara masih ada pedagang yang menjual Burung jenis Elang, Kukang, dan Burung Hantu, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.4.



Sumber : Data Primer, 2012

Gambar 4.4. Perdagangan Satwa di Pasar Burung Jatinegara

2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hutan sebagai habitat dari berbagai jenis tumbuhan dan satwa sekaligus juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar hutan. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa-desa di dalam dan sekitar hutan yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan cukup banyak, yaitu sekitar 48,8 juta orang, 10,2 juta orang diantaranya tergolong miskin (Kementerian Kehutanan, 2007). Kemiskinan dan keuntungan ekonomi yang dijanjikan dari

perdagangan tumbuhan dan satwa liar mendorong pemanfaatan yang berlebihan. Berdasarkan data register perkara di Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, pada kurun waktu 2008 – 2011 terdapat 98 kasus perburuan/pengambilan hasil hutan ilegal oleh masyarakat lokal dari total kasus kejahatan terhadap TSL sebanyak 256 kasus. Perdagangan ilegal merupakan bisnis yang melibatkan banyak pelaku, tidak hanya masyarakat sekitar hutan tetapi juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di pasar-pasar burung/hewan. Selain faktor ekonomi, faktor sosial budaya masyarakat juga perlu diperhatikan. Berkembangnya mitos-mitos tertentu di masyarakat akan manfaat tumbuhan dan satwa liar juga menjadi faktor dalam peningkatan eksploitasi terhadap sumber daya alam hayati tersebut. Seperti hasil survey dari ProFauna (2012), maraknya perdagangan primata di Palembang bukan hanya untuk peliharaan namun juga dikonsumsi daging dan otaknya. Konsumen olahan monyet adalah para pelaut/awak kapal yang berasal dari China, Taiwan, Vietnam dan Korea. Para pelaut tersebut mengambil otak monyet dan mengkonsumsinya karena diyakini dapat meningkatkan vitalitas.

3. Keterbatasan SDM Aparat pengawas dan penegak hukum di lapangan.

Saat ini jumlah rasio jumlah Polisi Kehutanan dan Luas Kawasan Hutan adalah sebesar 1 : 14.521 ha, dimana kondisi idealnya adalah 1 : 5.000 Ha. Polisi Kehutanan merupakan ujung tombak dalam pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan. Keterbatasan SDM juga terjadi pada petugas pengawas Bea Cukai yang ada di wilayah yang bertugas untuk mengawasi keluar masuknya komoditi perdagangan (ekspor – impor) termasuk juga tumbuhan dan satwa liar. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum karena kurangnya SDM merupakan celah bagi para pelaku perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar untuk melakukan penyelundupan. Penguatan kapasitas SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas mutlak diperlukan,

terutama untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di lapangan. Pengawasan ini sangat penting, seperti yang dinyatakan Prasetyo dan Sugardjito (2010) dalam penelitiannya tentang status populasi satwa primata di Taman Nasional Gunung Palung, bahwa didaerah dimana pengawasan hutan secara intensif dilaksanakan, kepadatan primata lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak ada patroli reguler.

Keterbatasan SDM sebenarnya dapat diminimalisir dengan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak masyarakat dan LSM. Seperti misalnya kelembagaan Kepolisian yang sampai tingkat kecamatan dapat diberdayakan untuk membantu aparat Kehutanan dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana disampaikan Kasubdit I Tipiter Bareskrim Polri :

"kelembagaan Kepolisian itu sampai di tingkat Sektor, sebenarnya apabila koordinasi dan kerjasama antar instansi dapat terjalin dengan sangat baik, teman-teman di lapangan dapat membantu untuk tugas-tugas seperti pengamanan dan penyidikan di daerah"

4. Keterbatasan Sarana Prasarana

Modus perdagangan tumbuhan dan satwa liar terus berkembang, saat ini yang sedang marak adalah penyelundupan trenggiling dengan modus dicampur dengan ikan beku. Kendala yang dihadapi oleh aparat Bea Cukai adalah keterbatasan waktu pemeriksaan, sementara sarpras untuk pemeriksaan juga terbatas, misalnya alat scan untuk kontainer. Alat tersebut hanya terdapat di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Kasus terakhir ditemukan penyelundupan trenggiling di vietnam dan diduga berasal dari Pelabuhan Belawan, Indonesia. Menurut Senior Analis di Ditjen Bea Cukai permasalahan terkait sarpras dan keterbatasan waktu pemeriksaaan menjadi kendala dalam pengawasan penyelundupan. Selain *hardware*, perlu juga ketersediaan *software* misalnya data base penanganan kasus yang terintegrasi dimana saat ini data base yang ada dimiliki secara parsial oleh masing-masing instansi. Apabila data base ini dapat

terintegrasi maka dapat dilakukan analisis mengenai modus, pola kejahatan, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan.

5. Banyaknya pasar gelap perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar
Saat ini hampir di tiap kota dapat ditemui pasar burung/hewan. Di pasar-pasar burung inilah sering menjadi tempat perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka, seperti yang diungkapkan oleh Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II sebagai berikut :

“salah satu permasalahan dalam pemberantasan kejahatan terhadap TSL adalah banyaknya pasar-pasar gelap perdagangan ilegal TSL dan perlu intelijen yang kuat untuk mengungkap perdagangan ilegal tersebut”

Hasil survey yang dilakukan oleh ProFauna di Palembang, ditemukan jenis-jenis yang dilindungi antara lain Kukang (*Nycticebus sp*), Siamang (*Hylobates syndactylus*), Kancil (*Tragulus sp*), beberapa jenis Elang, Nuri Kepala Hitam (*Lorius lory*) yang dijual di Pasar Burung Ilir dan Pasar Burung Cinde (ProFauna, 2012).

6. Kurangnya komitmen negara tujuan perdagangan ilegal TSL.

Salah satu penyebab maraknya *wildlife crime* adalah tingginya permintaan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri. Permintaan terbesar untuk perdagangan ilegal adalah dari China. Beberapa kasus penyelundupan sebagian besar negara tujuannya adalah China. Pemerintah China seharusnya memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan penertiban di internal negaranya untuk produksi obat-obat tradisional yang berbahan baku bagian tubuh satwa liar. Terkait komitmen negara-negara tujuan, juga diungkapkan oleh Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Hutan sebagai berikut :

“permasalahan lain dalam pemberantasan kejahatan terhadap TSL adalah kurangnya komitmen negara-negara tujuan seperti China, Vietnam. Buktinya masih saja terjadi kasus-kasus penyelundupan dari Indonesia yang lolos ke negara tersebut, seperti kasus kemarin yang dari Sumatera Utara”

Selama permintaan akan tumbuhan dan satwa liar masih tinggi maka kejahatan terhadap TSL akan terus terjadi.

4.4. Analisis Dampak Kerjasama ASEAN WEN

Menurut Suharto (2006) dalam Djadmiko (2007) evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan/program dapat dinilai dari kesesuaian antara hasil dan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam penilaian dampak kerjasama ASEAN WEN perlu diidentifikasi hasil yang telah dicapai.

4.4.1. Hasil Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberantasan *wildlife crime* terutama dalam operasi pengamanan telah mampu mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan diketahui bahwa dalam kurun waktu 2005 – 2011 jumlah kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar mengalami penurunan. Jumlah kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar selengkapnya disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Jumlah Kasus Kejahatan Terhadap TSL dan Penyelesaiannya Tahun 2005 – 2011

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Proses Penyelesaian Kasus						
			Non-yustisi	Lidik	Proses Yustisi				
					Sidik	SP 3	P 21	Sidang	Vonis
1	2005	112	17	2	93	0	67	52	51
2	2006	133	24	10	123	3	61	52	49
3	2007	111	61	9	41	0	28	25	21
4	2008	88	22	6	60	0	45	29	23
5	2009	88	9	4	75	2	57	33	27
6	2010	37	0	5	32	1	32	6	5
7	2011	43	0	1	42	0	37	3	3

Sumber : Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan 2005 - 2011

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dari tahun 2006 mengalami penurunan hanya dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan jumlah kasus. Apabila dilihat dari tiap jenis kasusnya sejak tahun 2007 s/d tahun 2011 terungkap kasus-kasus perdagangan ilegal dengan jumlah barang bukti yang sangat banyak.

Beberapa kasus besar yang berhasil terungkap antara lain tersaji dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Kasus Besar Kejahatan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2007 - 2012

No	Kasus	Tahun	Barang Bukti	Tersangka	Proses Hukum
1.	Kasus penyelundupan Penyu oleh Kapal berbendera China MV. Hainan di Perairan Kaltim	2007	387 ekor Penyu dan 3 Cangkrang Kima Raksasa	warga negara China bernama Wang Sue Cheng	vonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000,- subsidi 2 bulan
2.	Kasus penyelundupan Trenggiling di Pelabuhan Belawan Sumut	2008	258 ekor Trenggiling	4 orang	mendapat vonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000,-
3.	Kasus penyelundupan Trenggiling di Palembang	2008	13.812 Kg trenggiling	1 orang WN Malaysia dan 2 orang WNI	vonis 3 tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000,-
4.	Kasus perdagangan Harimau Sumatera di Deli Serdang Sumatera Utara	2008	2 ekor Harimau Sumatera	1 orang	vonis 2 tahun 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-
5.	Kasus perdagangan gading gajah di Sumatera Barat	2008	4 buah Gading Gajah	1 orang	vonis 8 bulan penjara dan denda Rp. 500.000,-
6.	Kasus kepemilikan satwa dilindungi di Jakarta		24 ekor satwa dilindungi	1 orang	Proses sidang
7.	Kasus perdagangan satwa liar di Jakarta		36 jenis bagian tubuh satwa liar dilindungi	1 orang	Proses persidangan
8.	Kasus penyelundupan Trenggiling (<i>Manis javanica</i>) di Belawan Sumatera Utara	2011	1.795 ekor dan 790 kg sisik trenggiling		Proses Penyidikan
9.	Kasus penyelundupan Trenggiling di Bandara Soekarno – Hatta Jakarta	2011	1.732 kg trenggiling dan 380 kg sisik trenggiling		P 21
10.	Penyelundupan trenggiling di pelabuhan Merak	2012	4.124,12 kg daging trenggiling dan 31,36 kg sisik trenggiling		Proses Penyidikan

Sumber : Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, 2012

Contoh barang bukti dari kasus-kasus tersebut seperti tersaji pada Gambar 4.5.



Sumber : Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Gambar 4.5. Barang Bukti Kasus Penyelundupan Penyu di Kalimantan Timur dan Penyelundupan Trenggiling di Pelabuhan Merak

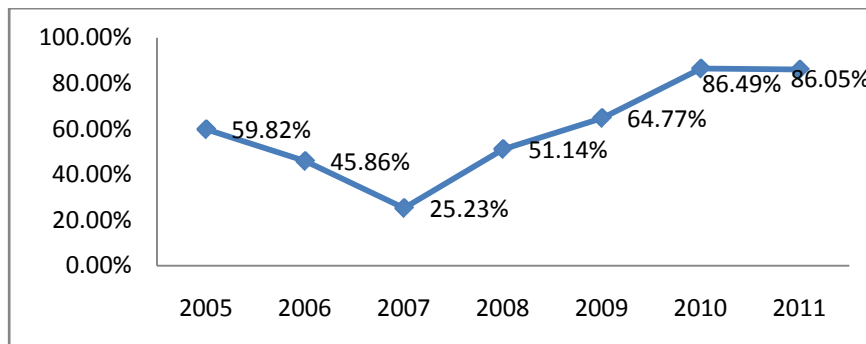
Kasus-kasus besar tersebut berhasil diungkap karena adanya koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum dari Kementerian Kehutanan, Kepolisian, Bea Cukai, dan juga Karantina. Seperti misalnya pada kasus penyelundupan Trenggiling di Palembang, kasus tersebut berhasil terungkap atas kerjasama aparat Kehutanan dan Bareskrim, Polri. Kasus-kasus penyelundupan di Pelabuhan dan Bandara juga hasil kerjasama antara aparat Kehutanan dan Bea Cukai. Hal ini menunjukkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia semakin baik. Sesuai dengan peraturan perundangan, hasil sitaan satwa tersebut disisihkan sebagai barang bukti dan sisanya kemudian dimusnahkan sebagaimana tersaji pada Gambar 4.6 :



Sumber : Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan, 2012

Gambar 4.6. Pemusnahan Barang Bukti Trenggiling

Berdasarkan data penyelesaian kasus yang ada juga dapat dilihat bahwa Persentase penyelesaian kasus sampai P 21 dari tahun 2007 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Gambar 4.7 :



Gambar 4.7. Grafik Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (P 21) Tahun 2005 – 2011

Peningkatan persentase penyelesaian kasus kejahatan terhadap TSL dapat menjadi indikasi bahwa kapasitas aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, untuk menyelesaikan kasus semakin meningkat. Dari data yang diperoleh, untuk kasus kejahatan terhadap TSL meskipun jumlah kasus secara keseluruhan semakin menurun namun dalam kurun 5 tahun terakhir banyak terungkap kasus-kasus besar, sebagaimana terlihat pada uraian sebelumnya. Kondisi ini juga menunjukkan jika kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus semakin baik.

Selain kejahatan terhadap TSL, bentuk *wildlife crime* lain yang juga menjadi bagian dalam kerjasama ASEAN WEN adalah kasus *illegal logging* atau pembalakan liar. Dalam Laporan Akuntabilitas Dit. Penyidikan dan Perlindungan Hutan (2009) disebutkan bahwa dalam kurun waktu 2005 - 2009 kasus *illegal logging* skala besar turun secara signifikan sebesar 85,13%. Pada kurun waktu 2005 – 2009, fokus penanganan untuk *wildlife crime* di Indonesia adalah pada pemberantasan *illegal logging*. Hal ini dikarenakan pada kurun waktu tersebut *illegal logging* sangat marak terjadi dan menjadi penyebab utama degradasi hutan dan lingkungan di Indonesia. *Illegal logging* di Indonesia bukan

hanya menjadi isu nasional namun juga menjadi isu global, sehingga pada tanggal 18 Maret 2005 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Salah satu penyebab maraknya *illegal logging* yang terjadi di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara supply kayu dengan permintaan dari industri, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Untuk memenuhi defisit supply kayu untuk industri maka kemudian banyak yang melakukan *illegal logging*, dan kayu-kayu ilegal dari Indonesia tersebut banyak yang diselundupkan ke luar negeri. Oleh karena itu, forum/kerjasama internasional perlu dilakukan untuk menghentikan peredaran ilegal hasil hutan (kayu) dari Indonesia.

Upaya-upaya penegakan hukum untuk memberantas *illegal logging* juga sudah dilakukan oleh Pemerintah. Jumlah kasus dan penyelesaiannya sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.7.

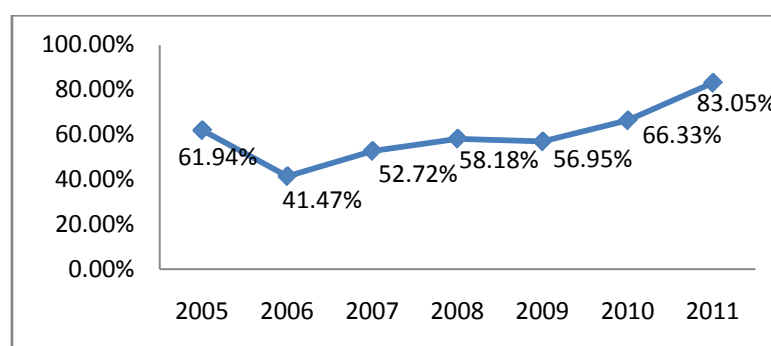
Tabel 4.7. Jumlah Kasus *Illegal logging* dan Penyelesaiannya Tahun 2005–2011

Tahun	Jumlah Kasus	Proses Penyelesaian Kasus						
		Non-yustisi	Lidik	Proses Yustisi				
				Sidik	SP 3	P 21	Sidang	Vonis
2005	720	3	9	708	25	446	285	251
2006	1705	22	119	1564	18	707	396	310
2007	478	10	104	364	2	252	200	154
2008	220	0	42	178	2	128	86	68
2009	151	6	27	118	7	86	57	45
2010	98	0	2	96	1	65	27	22
2011	59	0	0	59	0	49	2	1

Sumber : Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan 2005 - 2011

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kasus *illegal logging* pada tahun 2005 – 2006 mengalami kenaikan dan dari 2006 – 2011 mengalami penurunan jumlah kasus. Hal ini terjadi karena mulai akhir 2005 pemerintah sangat intensif melakukan upaya pemberantasan *illegal logging* dengan tonggak terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2005. Upaya operasi pemberantasan *illegal logging* dimulai dengan adanya Operasi Hutan Lestari (OHL) kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan

Kepolisian RI tahun 2005-2006 di Propinsi Papua dan Papua Barat, NAD, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Selain itu juga dilakukan operasi-operasi pengamanan hutan oleh internal Kementerian Kehutanan, sehingga pada tahun 2006 banyak diungkap kasus-kasus *illegal logging*. Untuk penyelesaian kasusnya, sesuai kewenangan yang ada di Penyidik, kasus yang sampai P 21 untuk masing-masing tahun adalah seperti yang tersaji pada Gambar 4.8. :



Gambar. 4.8. Grafik Persentase Penyelesaian Kasus *Illegal logging* (P 21) Tahun 2005 – 2011

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa persentase penyelesaian kasus ilegal logging sampai pada tahap P 21 (sesuai kewenangan Penyidik) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

4.4.2. Dampak Kerjasama ASEAN WEN

Dalam penilaian dampak kerjasama ASEAN WEN dilakukan pendekatan evaluasi formal, yaitu pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

Tujuan pembentukan jaringan kerjasama ASEAN WEN yaitu peningkatan penyidikan kasus *wildlife crime* dan peningkatan kapasitas penegakan hukum di negara-negara anggota. Dengan melihat hasil yang telah dicapai dapat diketahui bahwa kerjasama ASEAN WEN telah

memberikan dampak terhadap peningkatan upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan sebagaimana data dan informasi sebagai berikut :

1. Penurunan jumlah kasus *wildlife crime* di Indonesia.

Berdasarkan data Register Perkara di Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Tahun 2005 - 2011, diketahui bahwa untuk kasus *illegal logging* pada tahun 2005 terjadi 720 kasus dan meningkat menjadi 1705 kasus pada tahun 2006, namun sejak saat itu terus menurun sampai 59 kasus yang terjadi pada tahun 2011. Untuk kejahatan terhadap TSL pada tahun 2005 terjadi 112 kasus meningkat menjadi 133 kasus pada tahun 2006, kemudian menurun sampai 43 kasus yang terjadi pada tahun 2011. Penurunan jumlah kasus ini dapat menjadi indikasi bahwa upaya penegakan hukum (baik pre-emptif, preventif, represif, maupun yustisi) berhasil menekan tindak kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Upaya penegakan hukum merupakan bagian dari implementasi kerjasama ASEAN WEN.

2. Peningkatan persentase penyelesaian kasus-kasus *wildlife crime* sesuai kewenangan penyidik, yaitu menyelesaikan kasus sampai pada tahap P 21.

Persentase penyelesaian kasus *illegal logging* pada tahun 2006 sebesar 41,47% kemudian meningkat sampai pada tahun 2011 kasus yang berhasil diselesaikan sebesar 83,05 %. Kondisi tersebut juga terjadi untuk kasus kejahatan terhadap TSL, dari 45,86% kasus tahun 2006 yang berhasil diselesaikan meningkat sampai 86,05% kasus yang berhasil diselesaikan pada tahun 2011. Penyelesaian kasus hukum merupakan indikator keberhasilan upaya penegakan hukum dan juga dapat menjadi indikator peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Berdasarkan data di atas, kasus-kasus besar yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir meningkat dan dalam penyelesaian proses hukum kasus besar tersebut membutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih besar. Namun demikian, aparat

mampu menyelesaikan kasus-kasus tersebut sampai tahap P 21, artinya kapasitas aparat penegak hukum juga meningkat. Hasil yang dicapai ini sesuai tujuan dari ASEAN WEN yaitu peningkatan kapasitas penegakan hukum dan peningkatan penyidikan kasus *wildlife crime*.

3. Kerjasama dan koordinasi dalam pengungkapan kasus *wildlife crime* antar aparat penegak hukum.

Sebagaimana dalam pengungkapan kasus – kasus besar di atas, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama dari aparat di Bea Cukai, Karantina, Kepolisian, dan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan data penindakan kasus-kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Ditjen Bea Cukai, dari 17 kasus yang diungkap dari tahun 2007 – 2011 untuk penyelesaian dan proses hukumnya bekerjasama atau diserahkan kepada aparat Penyidik PNS Kementerian Kehutanan. Ditjen Bea Cukai juga telah mengembangkan *Indonesia National Single Window* untuk perijinan ekspor/impor komoditas perdagangan, termasuk tumbuhan dan satwa liar, dan telah dibentuk Forum National Single Window yang melibatkan Kementerian terkait termasuk Kehutanan. Forum ini rutin melakukan pertemuan setiap bulan untuk membahas hal terkait perdagangan ekspor/impor, termasuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang diindikasikan melakukan kegiatan ilegal, seperti penyalahgunaan dokumen untuk melakukan penyelundupan satwa liar. Ini sesuai yang dikemukakan oleh Senior Analis di Dit. Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai sebagai berikut :

“kami telah mengembangkan sitem Indonesia National Single Window, yang kami gunakan juga untuk kepentingan intelijen mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang diindikasikan melakukan kegiatan ilegal seperti penyelundupan tumbuhan dan satwa liar. Forum National Single Window termasuk dari Kementerian Kehutanan rutin melakukan pertemuan setiap bulan”

Selain dalam hal pengungkapan kasus, dalam penyelesaian kasus juga telah terjalin kerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum/Jaksa, sesuai pernyataan dari Koordinator Unit Tindak Pidana

Lingkungan Hidup, Satgas Sumber Daya Alam Kejaksaan Agung sebagai berikut :

“koordinasi kami dan Kementerian terkait dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan lingkungan telah terjalin dengan baik, apalagi di Kejaksaan saat ini terdapat Satgas Sumber Daya Alam untuk menangani kasus-kasus seperti illegal logging, kejahatan terhadap satwa liar dan illegal fishing, penambangan ilegal, dan tindak pidana lingkungan hidup”

Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu Penyidik PNS di Kementerian Kehutanan :

“kami sering berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan terutama dengan Satgas Sumber Daya Alam untuk penyelesaian kasus-kasus TSL atau illegal logging yang kami tangani”

Hal ini berarti koordinasi dan kerjasama aparat penegak hukum dalam pemberantasan *wildlife crime* telah terjalin dengan baik. Koordinasi dan kerjasama yang terjalin tersebut merupakan bagian dari peningkatan kapasitas penegakan hukum.

4. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum rutin dilaksanakan setiap tahun, misalnya pendidikan dan pelatihan PPNS di Kementerian Kehutanan. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemberantasan *wildlife crime*.

Kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendukung kebijakan Indonesia dalam memerangi atau memberantas *wildlife crime*. Kebijakan strategis yang ada di Kementerian Kehutanan khususnya di Direktorat Jenderal PHKA salah satunya adalah menekan aktifitas *illegal logging*, perambahan kawasan konservasi, perburuan, perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar dilindungi.. Adanya kerjasama ASEAN WEN ini juga menjadi pendorong dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Sorotan internasional terhadap pelaksanaan upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia dapat menjadi pendorong

kinerja aparat penegak hukum. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasubdit I Tipiter Bareskrim Polri dijelaskan bahwa :

“dengan adanya kerjasama ASEAN WEN maka kita didorong untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan wildlife crime, karena ada kewajiban bagi kita untuk melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai”

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini berpengaruh pada kebijakan penganggaran terutama di Direktorat Jenderal PHKA. Dalam penyusunan rencana anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan kerjasama ASEAN WEN, misalnya anggaran untuk sosialisasi/kampanye, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pelaksanaan serta keikutsertaan dalam workshop, seminar atau pertemuan yang terkait dengan kerjasama ASEAN WEN.

Namun demikian, untuk tataran operasional atau tindakan langsung di lapangan kerjasama ASEAN WEN belum bisa memberikan pengaruh secara langsung. Satuan Tugas Nasional ASEAN WEN yang telah dibentuk belum pernah secara langsung melakukan operasi pemberantasan secara bersama-sama di lapangan. Selain itu, ASEAN WEN juga tidak mendorong atau memfasilitasi operasi bersama diperbatasan antar negara yang berbatasan langsung seperti Indonesia dan Malaysia atau Indonesia dan Philipina.

4.5. Analisis Strategi Pemberantasan *Wildlife crime* Melalui Kerjasama ASEAN WEN.

Berbagai upaya dalam pemberantasan *wildlife crime* telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal PHKA sebagai pemangku kewenangan. Agar pemberantasan *wildlife crime* memperoleh hasil yang optimal perlu adanya strategi yang tepat dalam melakukan upaya tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan analisis strategi pemberantasan *wildlife crime* melalui upaya kerjasama ASEAN WEN menggunakan metode analisis SWOT. Lembaga yang dianalisis adalah Direktorat Jenderal PHKA yang merupakan *focal point* kerjasama ASEAN WEN dan pemangku kewenangan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar

di Indonesia. Analisis SWOT ini dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi Kondisi Internal dan Eksternal

a. Faktor Internal :

- Kekuatan :
 - Adanya peraturan perundangan terkait konservasi sumber daya alam hayati
 - Memiliki Polhut dan Penyidik PNS
 - Adanya satuan khusus Polisi Kehutanan, yaitu Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)
 - Kelembagaan lingkup Ditjen PHKA sampai ke tingkat daerah yang meliputi 27 Balai KSDA dan 50 Balai Taman Nasional.
 - Telah dibentuk *National Task Force ASEAN WEN*
 - Sebagai *CITES Management Authority*
- Kelemahan :
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan
 - Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam pengawasan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar
 - Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kurang optimal.
 - *National Task Force ASEAN WEN* belum berjalan efektif
 - Data base penanganan kasus *wildlife crime* antar instansi penegak hukum belum terintegrasi

b. Faktor Eksternal

- Peluang :
 - Dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian, Ditjen Bea Cukai, Karantina, dan Kejaksaan.
 - Dukungan ASEAN WEN dalam peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan penegakan hukum

- Dukungan dari negara-negara anggota ASEAN
- Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Ancaman :
 - Modus dan jaringan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang terus berkembang
 - Permintaan akan tumbuhan dan satwa liar yang tinggi
 - Banyaknya pintu keluar karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
 - Kepedulian masyarakat akan kelestarian tumbuhan dan satwa liar masih rendah.
 - Banyaknya pasar – pasar hewan yang juga menjadi pasar gelap perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar
 - Permasalahan kelestarian tumbuhan dan satwa liar belum menjadi isu strategis.

2. Analisis Faktor Strategi Internal dan Eksternal

Analisa masing-masing faktor tersebut dilakukan dengan pembobotan dan pemberian peringkat. Bobot yang diberikan antara 0-1, dimana angka 0 menunjukkan tidak penting dan angka 1 menunjukkan paling penting. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut kemudian diberi peringkat/rating yang menunjukkan nilai dukungan masing-masing faktor dalam mencapai tujuan. Besarnya nilai antara 1-5, dimana angka 1 menunjukkan berpengaruh sangat sedikit dan angka 5 sangat berpengaruh. Pemberian bobot dan peringkat pada masing-masing faktor internal dan eksternal selengkapnya tersaji pada Lampiran 2. Berdasarkan hasil pembobotan dan pemberian peringkat tersebut dapat diketahui nilai kepentingan dari faktor internal seperti tersaji di Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)

No	Faktor Strategis	Bobot	Peringkat	Skor
Kekuatan				
1.	Adanya peraturan perundangan terkait konservasi sumber daya alam hayati	0,106	5	0,532
2.	Memiliki Polhut dan Penyidik PNS	0,106	5	0,532
3.	Adanya satuan khusus Polisi Kehutanan, yaitu Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)	0,085	5	0,426
4.	Kelembagaan lingkup Ditjen PHKA sampai ke tingkat daerah yang meliputi 27 Balai KSDA dan 50 Balai Taman Nasional	0,085	4	0,340
5.	Telah dibentuk <i>National Task Force</i> ASEAN WEN	0,106	5	0,532
6.	Sebagai CITES Management Authority	0,085	5	0,426
Jumlah Skor Kekuatan				2,787
Kelemahan				
1.	Kurangnya Sumber Daya Manusia tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan	0,085	4	0,340
2.	Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam pengawasan peredaran ilegal TSL	0,085	4	0,340
3.	Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kurang optimal.	0,106	5	0,532
4.	<i>National Task Force</i> ASEAN WEN belum berjalan efektif	0,085	4	0,340
5.	Data base penanganan kasus <i>wildlife crime</i> antar instansi penegak hukum belum terintegrasi	0,064	4	0,255
Jumlah Skor Kelemahan				1,809
Jumlah Bobot		1,00		

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa ada 3 faktor kekuatan yang memiliki nilai kepentingan tertinggi yaitu adanya peraturan perundangan terkait konservasi sumber daya alam hayati, memiliki Polhut dan Penyidik PNS, dan telah dibentuk *National Task Force* ASEAN WEN. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut sangat penting dan sangat berpengaruh dalam mendukung pencapaian tujuan. Peraturan perundangan sangat penting karena menjadi landasan dalam pelaksanaan upaya konservasi sumber daya alam hayati. Polisi Kehutanan dan Penyidik PNS merupakan ujung tombak dalam penegakan peraturan perundangan di lapangan, sehingga juga menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan. Selain dua faktor tersebut, pembentukan *National Task Force* ASEAN WEN juga merupakan faktor yang sangat penting karena Task Force ini merupakan wadah koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam implementasi kerjasama ASEAN WEN untuk pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia. Satu faktor

kelemahan yang memiliki nilai kepentingan tertinggi yaitu koordinasi dan kerjasamandengan instansi terkait belum optimal. Koordinasi dan kerjasama instansi terkait dari pusat sampai ke daerah sangat diperlukan untuk mensinergiskan upaya pemberantasan *wildlife crime*. Selanjutnya untuk faktor eksternal tersaji pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)

No	Faktor Strategis	Bobot	Peringkat	Skor
Peluang				
1.	Dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian, Ditjen Bea Cukai, Karantina, dan Kejaksaan	0,114	5	0,568
2.	Dukungan ASEAN WEN dalam peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan penegakan hukum	0,114	5	0,568
3.	Dukungan dari negara-negara anggota ASEAN	0,091	4	0,364
4.	Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat	0,091	4	0,364
Jumlah Skor Peluang				1,864
Ancaman				
1.	Modus dan jaringan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang terus berkembang	0,114	5	0,568
2.	Permintaan akan tumbuhan dan satwa liar yang tinggi	0,091	5	0,455
3.	Banyaknya pintu keluar karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.	0,091	4	0,364
4.	Kepedulian masyarakat akan kelestarian tumbuhan dan satwa liar masih rendah.	0,114	5	0,568
5.	Banyaknya pasar – pasar hewan yang juga menjadi pasar gelap perdagangan ilegal TSL	0,091	4	0,364
6.	Permasalahan kelestarian tumbuhan dan satwa liar belum menjadi isu strategis	0,091	4	0,364
Jumlah Skor Ancaman				2,682
Jumlah Bobot		1,00		

Dari hasil perhitungan nilai kepentingan faktor eksternal terlihat bahwa ada 2 faktor peluang dengan skor tertinggi yaitu adanya dukungan dari instansi terkait dan dukungan ASEAN WEN dalam peningkatan kapasitas SDM dan penegakan hukum. Kedua faktor tersebut sangat penting dalam mendukung terciptanya koordinasi dan kerjasama antar instansi terutama melalui *National Task Force* ASEAN WEN dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan dan penegakan hukum *wildlife crime*.

Berdasarkan perbedaan nilai kepentingan dari faktor internal dan eksternal, yaitu nilai kepentingan faktor kekuatan dikurangi faktor

kelemahan adalah $2,787 - 1,809 = 0,979$ (positif) dan nilai faktor kepentingan peluang dikurangi faktor kepentingan ancaman adalah $1,864 - 2,682 = - 0,818$ (negatif), maka dapat diketahui bahwa dalam pemberantasan *wildlife crime* melalui kerjasama ASEAN WEN, Direktorat Jenderal PHKA dapat memaksimalkan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman.

3. Perumusan Alternatif Strategi

Berdasarkan analisis faktor strategis di atas, kemudian dilakukan indentifikasi penyusunan strategi pemberantasan *wildlife crime* melalui implementasi kerjasama ASEAN WEN dengan mempertimbangkan dan menggabungkan masing-masing faktor sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.10 :

Tabel 4.10. Matrik SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p>Strength (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan perundangan terkait konservasi sumber daya alam hayati - Memiliki Polihut dan Penyidik PNS - Adanya satuan khusus Polisi Kehutanan, yaitu Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) - Kelembagaan lingkup Ditjen PHKA sampai ke tingkat daerah yang meliputi 27 Balai KSDA dan 50 Balai Taman Nasional. - Telah dibentuk <i>National Task Force</i> ASEAN WEN - Sebagai CITES Management Authority 	<p>Weakness (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM tenaga pengawasan dan pengamanan di lapangan - Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam pengawasan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar - Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kurang optimal. - <i>National Task Force</i> ASEAN WEN belum berjalan efektif - Data base penanganan kasus <i>wildlife crime</i> antar instansi penegak hukum belum terintegrasi.
<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>Opportunity (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian, Ditjen Bea Cukai, Karantina, dan Kejaksaan. - Dukungan ASEAN WEN dalam peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan penegakan hukum - Dukungan dari negara-negara anggota ASEAN - Dukungan dari LSM 	<p>STRATEGI-SO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi peran <i>National Task Force</i> ASEAN WEN yang melibatkan semua instansi terkait dan LSM sampai ke tingkat daerah dengan memanfaatkan SDM dan kelembagaan masing-masing instansi. (S5, S6, O1, O2, O4) - Peningkatan kerjasama bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN dan mendorong komitmen tiap negara dalam pemberantasan <i>wildlife crime</i>. (S6,O2,O3) 	<p>STRATEGI-WO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah melalui <i>National Task Force</i> ASEAN WEN (W1,W3,W4, O1, O4) - Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan (W1,O1,O2,O4) - Peningkatan sharing data dan informasi antar instansi melalui pengembangan data base yang terintegrasi. (W5,O1)
<p>Threat (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modus dan jaringan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang terus berkembang - Permintaan akan tumbuhan dan satwa liar yang tinggi - Banyaknya pintu keluar karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. - Kepedulian masyarakat akan kelestarian tumbuhan dan satwa liar masih rendah. - Banyaknya pasar – pasar hewan yang juga menjadi pasar gelap perdagangan ilegal TSL - Permasalahan kelestarian tumbuhan dan satwa liar belum menjadi isu strategis. 	<p>STRATEGI-ST</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan operasi penegakan hukum (patroli, intelijen, represif, & yustisi) untuk mengungkap kasus peredaran ilegal TSL, baik oleh internal Kementerian Kehutanan maupun gabungan anggota <i>National Task Force</i> ASEAN WEN. (S1,S2,S3,T1,T2,T3, T5) - Peningkatan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang peraturan perundangan, pengenalan jenis dilindungi, dan nilai manfaat keanekaragaman hayati. (S1, S2, T4,T6) 	<p>STRATEGI-WT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan. (W1,T4,T5) - Peningkatan sarana prasarana dalam pengawasan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar (W2,T1,T3)

Dalam menentukan alternatif kebijakan maka berdasarkan hasil analisis SWOT didapatkan beberapa alternatif strategi yaitu :

STRATEGI-SO

- Optimalisasi peran *National Task Force* ASEAN WEN yang melibatkan semua instansi terkait dan LSM sampai ke tingkat daerah dengan memanfaatkan SDM dan kelembagaan masing-masing instansi. (S5, S6, O1, O2, O4)
- Peningkatan kerjasama bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN dan mendorong komitmen tiap negara dalam pemberantasan *wildlife crime*. (S6,O2, O3)

STRATEGI-ST

- Peningkatan operasi penegakan hukum (patroli, intelijen, represif, & yustisi) untuk mengungkap kasus peredaran ilegal TSL, baik oleh internal Kementerian Kehutanan maupun gabungan anggota *National Task Force* ASEAN WEN. (S1,S2,S3,T1,T2,T3, T5)
- Peningkatan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang peraturan perundangan, pengenalan jenis dilindungi, dan nilai manfaat keanekaragaman hayati. (S1,S2, T4,T6)

STRATEGI-WO

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah melalui *National Task Force* ASEAN WEN (W1,W3,W4, O1, O4)
- Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan (W1,O1,O2,O4)
- Peningkatan sharing data dan informasi antar instansi melalui pengembangan data base yang terintegrasi. (W5,O1)

STRATEGI-WT

- Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan. (W1,T4,T5)

- Peningkatan sarana prasarana dalam pengawasan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar (W2,T1,T3)

Berdasarkan kombinasi faktor eksternal dan internal diperoleh alternatif strategi yang kemudian dapat dihitung bobot pada masing – masing alternatif strategi untuk menentukan prioritas strategi yang akan dilakukan. Hasil penilaian dan urutan prioritas strategi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Urutan Prioritas Strategi

No	Alternatif Strategi	Faktor terkait	Bobot	Prioritas
1	Peningkatan operasi penegakan hukum (patroli, intelijen, represif, & yustisi) untuk mengungkap kasus peredaran ilegal TSL, baik oleh internal Kementerian Kehutanan maupun gabungan anggota <i>National Task Force</i> ASEAN WEN.	S1,S2,S3,T1,T2,T3,T5	3,239	I
2	Optimalisasi peran <i>National Task Force</i> ASEAN WEN yang melibatkan semua instansi terkait dan LSM sampai ke tingkat daerah dengan memanfaatkan SDM dan kelembagaan masing-masing instansi.	S5, S6, O1, O2, O4	2,457	II
3	Peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah melalui <i>National Task Force</i> ASEAN WEN	W1,W3,W4, O1,O4	2,145	III
4	Peningkatan public awareness melalui sosialisasi dan kampanye tentang peraturan perundangan, pengenalan jenis dilindungi, dan nilai manfaat keanekaragaman hayati.	S1,S2,T4,T5	1,996	IV
5	Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan	W1,O1, O2, O4	1,840	V
6	Peningkatan kerjasama bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN dan mendorong komitmen tiap negara dalam pemberantasan <i>wildlife crime</i>	S6,O2, O3	1,357	VI
7	Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan.	W1,T4,T5	1,272	VII
8	Peningkatan sarana prasarana dalam pengawasan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar.	W2,T1,T3	1,272	VII
9	Peningkatan sharing data dan informasi antar instansi melalui pengembangan data base yang terintegrasi.	W5,O1	0,824	VIII

Hasil penilaian menunjukkan bahwa ada 5 strategi prioritas yang diperoleh yaitu :

1. Peningkatan operasi penegakan hukum (patroli, intelijen, represif, & yustisi) untuk mengungkap kasus peredaran ilegal TSL, baik oleh internal Kementerian Kehutanan maupun gabungan anggota *National Task Force ASEAN WEN*.

Strategi ini merupakan prioritas pertama karena dalam strategi ini terkait 3 faktor strategis kekuatan untuk menanggulangi 4 faktor ancaman, dan tiap faktor memiliki bobot dan rating tinggi sehingga memiliki total skor yang tinggi. Ini menunjukkan faktor-faktor yang terkait memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pemberantasan *wildlife crime*. Operasi penegakan hukum ini penting untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran dan memberikan hukuman bagi para pelaku pelanggaran agar tindak *wildlife crime* dapat ditekan dan dikurangi. Berdasarkan data yang ada, kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Akan tetapi ancaman tersebut masih ada karena masih tingginya permintaan akan tumbuhan dan satwa liar dan banyaknya pasar gelap perdagangan tumbuhan dan satwa liar, sehingga operasi penegakan hukum harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Selain itu, untuk mengantisipasi modus kejahatan dan jaringan yang terus berkembang perlu diintensifkan operasi intelijen. Operasi ini dapat dilakukan dengan peningkatan peran Polisi Kehutanan, SPORC, dan Penyidik PNS lingkup Kementerian Kehutanan. Selain itu juga perlu dilakukan operasi gabungan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam *National Task Force ASEAN WEN*.

2. Optimalisasi peran *National Task Force ASEAN WEN* yang melibatkan semua instansi terkait dan LSM sampai ke tingkat daerah dengan memanfaatkan SDM dan kelembagaan masing-masing instansi.

Strategi ini merupakan strategi S-O dimana ada 5 faktor strategis yang terkait yaitu 2 faktor kekuatan untuk meraih 3 faktor peluang yang ada. Saat ini *National Task Force* ASEAN WEN telah terbentuk namun belum berjalan efektif, untuk itu perlu optimalisasi peran dari *Task Force* tersebut. *Task Force* ini sangat penting karena dapat menjadi media koordinasi dan kerjasama dari pihak terkait. Dukungan baik dari instansi terkait, LSM, dan negara anggota lain seharusnya dapat dimanfaatkan Direktorat Jenderal PHKA untuk mensinergiskan upaya pemberantasan *wildlife crime* melalui wadah *Task Force* tersebut. Optimalisasi ini diawali dengan restrukturisasi keanggotaan *Task Force* agar lebih bersifat operasional.

3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah melalui *National Task Force* ASEAN WEN.

Strategi ini merupakan strategi W-O dimana untuk mengatasi 3 faktor kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan 2 peluang yang ada. Koordinasi dan kerjasama antar instansi tidak hanya terjalin baik di pusat tetapi juga harus sampai ke tingkat daerah, sehingga upaya penegakan hukum kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dapat sinergis sampai ke tingkat daerah.

4. Peningkatan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang peraturan perundangan, pengenalan jenis dilindungi, dan nilai manfaat keanekaragaman hayati.

Strategi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Kepedulian masyarakat yang tinggi dapat menjadikan permasalahan *wildlife crime* sebagai isu strategis, sehingga dapat mendukung dan memudahkan upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia.

5. Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan.

Salah satu tujuan pembentukan ASEAN WEN adalah peningkatan kapasitas penegakan hukum. Indonesia dapat mendorong ASEAN WEN Program Coordination Unit untuk lebih banyak menyelenggarakan pelatihan - pelatihan bagi aparat penegak hukum. Peningkatan kapasitas SDM tenaga pengawas dan penegak hukum dilapangan merupakan faktor penting dalam upaya pemberantasan *wildlife crime*, karena tenaga pengawas dan penegak hukum merupakan ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta aturan-aturan di bawahnya belum terimplementasi dengan baik dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya eksploitasi sumber daya alam hayati melalui perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.
2. *Wildlife crime* di Indonesia dilatarbelakangi oleh tingginya nilai ekonomi dari perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, sehingga banyak melibatkan masyarakat lokal/sekitar hutan sebagai pemburu. Perdagangan ilegal tersebut memicu eksploitasi tumbuhan dan satwa liar yang dapat berakibat pada kepunahan jenis, menurunnya keanekaragaman hayati dan daya dukung lingkungan.
3. Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama ASEAN WEN meskipun ada beberapa program yang belum berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu pembentukan *National Task Force* ASEAN WEN dan peningkatan kepedulian masyarakat. Implementasi kerjasama ASEAN WEN ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan upaya pemberantasan *wildlife crime* yang diindikasikan antara lain (a) penurunan jumlah kasus *wildlife crime*, (b) peningkatan persentase penyelesaian secara hukum kasus *wildlife crime*, (c) peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pengungkapan kasus *wildlife crime* antar aparat penegak hukum dan (d) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Strategi pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia melalui kerjasama ASEAN WEN yang diprioritaskan untuk dilakukan yaitu (a) peningkatan operasi penegakan hukum (patroli, intelijen, represif, & yustisi) untuk mengungkap kasus peredaran ilegal TSL, baik oleh internal Kementerian Kehutanan maupun gabungan anggota *National Task Force* ASEAN WEN, (b) optimalisasi peran *National Task Force* ASEAN WEN yang melibatkan semua instansi terkait dan LSM sampai ke tingkat daerah dengan memanfaatkan SDM dan kelembagaan masing-masing instansi, (c) peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah melalui *National Task Force* ASEAN WEN, (d) peningkatan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang peraturan perundangan, pengenalan jenis dilindungi, dan nilai manfaat keanekaragaman hayati serta (e) pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan. Dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia sehingga kelestarian potensi keanekaragaman hayati dapat terjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia.

5.2. Saran

1. Perlu disusun *Standard Operating Procedure* (SOP) terutama bagi implementor UU Nomor 5 Tahun 1990 di lapangan. SOP itu antara lain tentang prosedur pengawasan, prosedur pemeriksaan dokumen kelengkapan dalam perdagangan tumbuhan dan satwa, prosedur penanganan satwa hasil sitaan, serta prosedur kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai/manfaat sumber daya alam hayati bagi lingkungan hidup dan keberlanjutan pemanfaatannya, sehingga manfaat sumber daya alam hayati tidak hanya dinilai dari keuntungan ekonomi jangka

pendek. Selain itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber daya alam sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga.

3. Perlu dilakukan operasi bersama antar negara anggota ASEAN WEN, terutama negara-negara yang berbatasan langsung, seperti misalnya Indonesia dengan Malaysia atau Singapura, untuk lebih memberikan dampak langsung adanya kerjasama ASEAN WEN terhadap pemberantasan *wildlife crime* di regional ASEAN.
4. Implementasi strategi pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia untuk mendukung kelestarian lingkungan, terutama sumber daya alam hayati, dapat dilakukan melalui upaya – upaya :
 - a. Peningkatan kegiatan patroli dan pengawasan di kawasan-kawasan konservasi maupun di lokasi rawan peredaran dan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar, pengembangan operasi intelijen untuk menganalisis perkembangan modus dan jaringan *wildlife crime*, peningkatan operasi represif dan razia di pasar-pasar perdagangan satwa, dan diikuti dengan penegakan hukum bagi pelaku-pelaku *wildlife crime*.
 - b. Perlu restrukturisasi keanggotaan *National Task Force* ASEAN WEN agar lebih bersifat operasional dan melibatkan para pihak terkait, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - c. Perlu payung hukum yang lebih tinggi untuk pembentukan *National Task Force* ASEAN WEN, setingkat Keputusan Menteri.
 - d. Perlu upaya untuk peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye terutama di pasar-pasar burung/pasar hewan. Media sosialisasi dan kampanye yang digunakan tidak hanya poster atau selebaran tetapi juga memanfaatkan media elektronik atau media-media sosial di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, D., Davies, C., Gosling, Newman, J., Rice, M., Wadley, J., Walravens, F. 2008. *Environmental Crime A Threat to Our Future*. Environmental Investigation Agency (EIA)
- Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati laut – Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djadmiko. 2007. *Evaluasi Pengelolaan Cagar Alam Mandor di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Universitas Diponegoro
- Irwan, Z.D. 1996. *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas & Lingkungan*. Jakarta
- Lee, R.J, Gorog, A.J, Dwiyahreni, A., Siwu, S., Riley, J., Alexander, H., Paoli, G.D., Ramono, W. 2005. Wildlife Trade and Implications for Law Enforcement in Indonesia : A Case Study From North Sulawesi. *Biological Conservation*. 123 : 477 – 488
- Lengkong, H.J. 2011. Laju Degradasi Habitat Monyet Hitam Sulawesi (Macaca nigra) di Cagar Alam Gunung Duasudara Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Sains* 11 (1) : 31 - 35
- Marimin, 2004. *Teknik dan Aplikasi : Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Grasindo, Jakarta.
- Mangunjaya, F. 2006. *Hidup Harmonis dengan Alam : esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Nijman, V. 2009. An Overview of International Wildlife Trade from Southeast Asia. *Biodiversity Conservation* 19 : 1101 – 1114.
- _____, Nekaris, K.A.I., Donati, G., Bruford, M., Fa, J. 2011. Primate Conservation : Measuring and Mitigating Trade in Primates. *Journal of Endangered Species Research* 13 : 159 – 161.

- _____. Shepherd, C.R., Balen, S.V. 2009. Declaration of The Javan Hawk Eagle *Spizaetus bartelsi* as Indonesia's National Rare Animal Impedes Conservation of The Species. *Oryx Journal*, 43 (1) : 122 – 128.
- Pires, S.F., Moreto, W.D. 2011. Preventing Wildlife Crime : Solution That Can Overcome the 'Tragedy of The Commons'. *Euro Journal of Criminal Policy Research* 17 : 101 – 123.
- Pokja Kebijakan Konservasi. 2008. *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Jakarta
- Prabowo, A. 2004. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional Karimunjawa Paska Pelaksanaan UU No.22/1999*. Tesis. Universitas Diponegoro
- Prasetyo, D., Sugardjito, J. 2010. Status Populasi Satwa Primata di Taman Nasional Gunung Palung dan Daerah Penyangga, Kalimantan Barat. *Jurnal Primatologi Indonesia* 7 (2) : 60 – 86.
- ProFauna, 2012. *Perdagangan Primata di Palembang, Sumatera Selatan*. ProFauna, Malang
- Putra, Y.A.E., Masy'ud, B., Ulfah, M. 2008. Keanekaragaman Satwa Berkhasiat Obat di Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat Indonesia. *Media Konservasi* 13 (1) : 8 - 15
- Rangkuti, F. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rosen, G.E., Smith, K.F. 2010. Summarizing the Evidence on the International Trade in Illegal Wildlife. *EcoHealth* 7 : 24 – 32.
- Shepherd, C.R. 2010. Illegal Primate Trade in Indonesia Exemplified by Surveys Carried Out Over a Decade in North Sumatra. *Journal of Endangered Species Research* 11 : 201 – 205.
- Sinaga, H.N.A. 2008. *Perdagangan Jenis Kura – Kura Darat dan Kura – Kura Air Tawar di Jakarta*. Tesis. Institut Pertanian Bogor
- Soemarwoto, O. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan

- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke 6. CV. Alfabeta. Bandung
- Suryati, T., Salim, F., Titiresmi. 2007. Pemanasan Global dan Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Teknik Lingkungan* 8 (1) : 61 – 68.
- Susdiyanti, T., Mubarak, F., Nitibaskara, T.U.2008. Kajian Manajemen Pengelolaan Satwa Liar di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur Kalideres – Jakarta Barat. *Jurnal Nusa Sylva* 8 : 1 – 8
- WCED. 1988. *Hari Depan Kita Bersama*. Gramedia, Jakarta
- Weston, M.K., Memon, M.A. 2009. The Illegal Parrot Trade in Latin America and Its Consequences to Parrot Nutrition, Health and Conservation. *Bird Population* 9 : 76 – 83.
- Widodo, W. 2007. Profil dan Persepsi Para Pedagang Burung Terhadap Perdagangan Burung Perkici Pelangi (*Trichoglossus haematodus*) dan Upaya Pelestariannya. *Berkala Penelitian Hayati* 13 : 67 – 72.
- Wiratno, Indriyo, D., Syarifudin, A., Kartikasari, A. 2004. *Berkaca di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan taman Nasional*. The Gibbon foundation, PILI-NGO Movement, Jakarta
- ASEAN WEN. 2009. Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia. http://www.aseanwen.org/index.php?option=comdocman&task=doc_download&gid = 5&Itemid=80. Diakses tanggal 23 September 2012
- _____. 2009. *What is ASEAN WEN*. http://www.aseanwen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55. Diakses tanggal 6 Agustus 2012
- _____. 2011. Report The Sixth Meeting of The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN).

Detiknews, 2011. *Kasus Pembantaian Orangutan, Perusahaan Sawit Terancam Ditutup*. <http://news.detik.com/read/2011/12/09/222204/1787727/10/kasus-pembantaian-orang-utan-perusahaan-sawit-terancam-ditutup>. Diakses tanggal 27 September 2012

Okezone. 2011. *Penyelundupan Trenggiling Senilai Rp 23 M Digagalkan*. <http://news.okezone.com/read/2011/07/11/338/478517/penyelundupan-trenggiling-senilai-rp23-m-digagalkan>. Diakses tanggal 27 Agustus 2012

KOMPAS, 2011. *Ini Kronologi Penyelundupan Trenggiling*. <http://sains.kompas.com/read/2011/05/26/18532641/Ini.Kronologi.Penyelundupan.Trenggiling>. Diakses tanggal 28 September 2012

Tribun Jambi, 2012. *TNKS Amankan 18 Kulit Harimau*. <http://jambi.tribunnews.com/2012/07/30/tnks-amankan-18-kulit-harimau>. Diakses tanggal 29 Oktober 2012

Tribun Jambi, 2012. *Kulit Harimau Sangat Mahal Harganya*. <http://jambi.tribunnews.com/2012/07/30/kulit-harimau-sangat-mahal-harganya>. Diakses tanggal 29 Oktober 2012

Kementerian Kehutanan. 2012. *Statistik Kehutanan Indonesia 2011*. Kementerian Kehutanan

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan/Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.128/IV-PPH/2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Nasional (*National Task Force*) ASEAN WEN.

Lampiran 1. Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA**Judul Penelitian :**

PEMBERANTASAN *WILDLIFE CRIME* DI INDONESIA MELALUI KERJASAMA ASEAN WILDLIFE ENFORCEMENT NETWORK (ASEAN-WEN)

Oleh : Sigit Himawan

(Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro)

Tujuan :

5. Mengkaji dampak kerjasama ASEAN-WEN terhadap upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia.
6. Merumuskan usulan strategi pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia melalui implementasi kerjasama ASEAN-WEN.

Pelaksanaan Wawancara :

Nama Responden : _____

Instansi/Institusi : _____

Hari / Tanggal : _____

Lokasi : _____

1. Apa saja faktor-faktor penyebab/pendorong terjadinya kejahatan terhadap TSL?
2. Bagaimana bentuk (tipologi dan modus) kejahatan terhadap TSL yang terjadi di Indonesia?
3. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap TSL di Indonesia?
4. Instansi mana saja yang berwenang dalam pemberantasan kejahatan terhadap TSL?
5. Selama ini instansi mana yang melakukan upaya pemberantasan kejahatan terhadap TSL?
6. Apakah ada kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap TSL? Apabila ada, bagaimana hal itu dilakukan?

7. Apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap TSL?
8. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Negara-negara ASEAN dalam ASEAN WEN sebagai upaya untuk memberantas kejahatan terhadap TSL, apa saja yang telah dilakukan dalam rangka kerjasama tersebut?
9. Bagaimana dukungan Negara-negara lain terhadap upaya pemberantasan kejahatan TSL di Indonesia?
10. Kerjasama ASEAN WEN memiliki tujuan untuk peningkatan peyidikan dan peningkatan kapasitas SDM, sejauh mana dukungan ASEAN-WEN untuk Indonesia dalam pencapaian tujuan tersebut?
11. Kasus-kasus apa saja yang telah ditangani terkait kejahatan terhadap TSL tersebut?
12. Bagaimana penyelesaian atas kasus-kasus tersebut ?
13. Terkait peningkatan kapasitas SDM, apa saja yang telah dilakukan?
14. Dalam rangka kerjasama tersebut, di Indonesia juga telah dibentuk gugus tugas ASEAN WEN tingkat nasional, bagaimana mekanisme kerja gugus tugas tersebut dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap TSL?
15. Sejauh mana peran masing-masing anggota gugus tugas dalam pelaksanaan kerjasama tersebut?
16. Bagaimana kerjasama ASEAN WEN dalam tingkat nasional dapat terimplementasi sampai ke tingkat daerah?
17. Apakah ada monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas Nasional ASEAN-WEN dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap TSL? Apabila ada, bagaimana hal itu dilakukan?
18. Apakah ada keterlibatan lembaga-lembaga non pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap TSL tersebut?
19. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama ASEAN-WEN?
20. Menurut Bpk/Ibu strategi apa yang tepat untuk mendorong keberhasilan upaya pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar melalui kerjasama ASEAN WEN?

Lampiran 2. Pemberian Bobot dan Peringkat Pada Faktor Internal dan Eksternal

Tabel 1. Pemberian Bobot untuk Kekuatan (*Strength*)

No	Faktor Strategis	Bobot				
Kekuatan		1	2	3	4	5
1.	Adanya peraturan perundangan terkait konservasi sumber daya alam hayati					√
2.	Memiliki Polihut dan Penyidik PNS					√
3.	Adanya satuan khusus Polisi Kehutanan, yaitu Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)				√	
4.	Kelembagaan lingkup Ditjen PHKA sampai ke tingkat daerah yang meliputi 27 Balai KSDA dan 50 Balai Taman Nasional				√	
5.	Telah dibentuk <i>National Task Force</i> ASEAN WEN					√
6.	Sebagai CITES Management Authority				√	

Tabel 2. Pemberian Bobot untuk Kelemahan (*Weakness*)

No	Faktor Strategis	Bobot				
Kelemahan		1	2	3	4	5
1.	Kurangnya Sumber Daya Manusia tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan				√	
2.	Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam pengawasan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar				√	
3.	Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kurang optimal.					√
4.	<i>National Task Force</i> ASEAN WEN belum berjalan efektif				√	
5.	Data base penanganan kasus <i>wildlife crime</i> antar instansi penegak hukum belum terintegrasi			√		

Tabel 3. Pemberian Bobot untuk Peluang (*Opportunity*)

No	Faktor Strategis	Bobot				
Peluang		1	2	3	4	5
1.	Dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian, Ditjen Bea Cukai, Karantina, dan Kejaksaan					√
2.	Dukungan ASEAN WEN dalam peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan penegakan hukum					√
3.	Dukungan dari negara-negara anggota ASEAN				√	
4.	Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat				√	

Tabel 4. Pemberian Bobot untuk Ancaman (*Threat*)

No	Faktor Strategis	Bobot				
Ancaman		1	2	3	4	5
1.	Modus dan jaringan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang terus berkembang					√
2.	Permintaan akan tumbuhan dan satwa liar yang tinggi				√	
3.	Banyaknya pintu keluar karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.				√	
4.	Kepedulian masyarakat akan kelestarian tumbuhan dan satwa liar masih rendah.					√
5.	Banyaknya pasar – pasar hewan yang juga menjadi pasar gelap perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar				√	
6.	Permasalahan kelestarian tumbuhan dan satwa liar belum menjadi isu strategis				√	

Keterangan : bobot 1 (tidak penting) s.d 5 (sangat penting) dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis

Tabel 5. Pemberian Peringkat untuk Kekuatan (*Strength*)

No	Faktor Strategis	Peringkat				
Kekuatan		1	2	3	4	5
1.	Adanya peraturan perundangan terkait konservasi sumber daya alam hayati					√
2.	Memiliki Polihut dan Penyidik PNS					√
3.	Adanya satuan khusus Polisi Kehutanan, yaitu Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)					√
4.	Kelembagaan lingkup Ditjen PHKA sampai ke tingkat daerah yang meliputi 27 Balai KSDA dan 50 Balai Taman Nasional				√	
5.	Telah dibentuk <i>National Task Force</i> ASEAN WEN					√
6.	Sebagai CITES Management Authority					√

Tabel 6. Pemberian Peringkat untuk Kelemahan (*Weakness*)

No	Faktor Strategis	Peringkat				
Kelemahan		1	2	3	4	5
1.	Kurangnya Sumber Daya Manusia tenaga pengawas dan pengamanan di lapangan				√	
2.	Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam pengawasan peredaran ilegal TSL				√	
3.	Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kurang optimal.					√
4.	<i>National Task Force</i> ASEAN WEN belum berjalan efektif				√	
5.	Data base penanganan kasus <i>wildlife crime</i> antar instansi penegak hukum belum terintegrasi				√	

Tabel 7. Pemberian Peringkat untuk Peluang (*Opportunity*)

No	Faktor Strategis	Peringkat				
Peluang		1	2	3	4	5
1.	Dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian, Ditjen Bea Cukai, Karantina, dan Kejaksaan					√
2.	Dukungan ASEAN WEN dalam peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan penegakan hukum					√
3.	Dukungan dari negara-negara anggota ASEAN				√	
4.	Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat				√	

Tabel 8. Pemberian Peringkat untuk Ancaman (*Threat*)

No	Faktor Strategis	Peringkat				
Ancaman		1	2	3	4	5
1.	Modus dan jaringan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang terus berkembang					√
2.	Permintaan akan tumbuhan dan satwa liar yang tinggi					√
3.	Banyaknya pintu keluar karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.				√	
4.	Kepedulian masyarakat akan kelestarian tumbuhan dan satwa liar masih rendah.					√
5.	Banyaknya pasar – pasar hewan yang juga menjadi pasar gelap perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar				√	
6.	Permasalahan kelestarian tumbuhan dan satwa liar belum menjadi isu strategis				√	